

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS  
PELAYANAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH UPTD PPA WILAYAH  
XV ACEH SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**NAMA : NAYLA RAMADHIA NAZLIDA  
NPM : 1905170324  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

#### MEMUTUSKAN

Nama : NAYLA RAMADHIA NAZLIDA  
N P M : 1905170324  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH UPTD PPA WILAYAH XV ACEH SELATAN

Dinyatakan : ( A ) *Lulus Tadrisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

#### TIM PENGUJI

Pengji I

(RIVA UBAR HARAHAP, S.E., M.Si, Ak., CA., CPA)

Pengji II

(IKHSAN ABDULLAH, S.E., M.Si)

Pembimbing

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si)

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : NAYLA RAMADHIA NAZLIDA  
N P M : 1905170324  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH UPTD PPA WILAYAH XV ACEH SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 15 Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui  
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)



(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : NAYLA RAMADHIA NAZLIDA  
N P M : 1905170324  
Dosen Pembimbing : KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M. SI.  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH UPTD PPA WILAYAH XV ACEH SELATAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Masukkan data target & Realisasi - Pertegas pengungkapan fenomena	10/ Maret 2023	
Bab 2	- Teori tentang ukuran efektivitas - Teori tentang Pelayanan - Penelitian terdahulu → kerangka konseptual	27/ Maret 2023	
Bab 3	- Definisi Operasional - kisi - kisi Indikator	10/ April 2023	
Bab 4	- Pembahasan harus menjawab rumusan masalah	24/ Juli 2023	
Bab 5	- Kesimpulan dan Saran harus 2 halaman saja	7/ Agustus 2023	
Daftar Pustaka	- Sesuai mandeley	7/ Agustus 2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	- ACC untuk meja hijau	7/ Agustus 2023	

Medan, 7 Agustus 2023

Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Diketahui / Disetujui  
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HUNUM, S.E., M.SI.)

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.SI.)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nayla Ramadhia Nazlida

NPM : 1905170324

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Medan, 21 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Nayla Ramadhia Nazlida

NPM. 1905170324

## ABSTRAK

### **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH UPTD PPA WILAYAH XV ACEH SELATAN**

**Nayla Ramadhia Nazlida**

Program Studi Akuntansi

E-Mail: [naylanazlida@gmail.com](mailto:naylanazlida@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Teknik pengambilam sampel menggunakan rumus slovin. Sampel yang diperoleh berjumlah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan. Data dianalisis dengan uji kualitas data, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 29.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal ini dikarenakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,058 > 1,984$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,042 < 0,05$ ). Kualitas pelayanan secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal ini dikarenakan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1,316 < 1,984$ ) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,191 > 0,05$ ). Kemudian secara simultan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hal ini dikarenakan nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $3,472 > 3,09$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,035 < 0,05$ ). Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,306 yang menunjukkan bahwa pengaruh dari kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 30,6% dan sisanya 69,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti oleh peneliti.

**Kata Kunci** : Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

## ABSTRACT

### **THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS AND SERVICE QUALITY ON MOTOR VEHICLE TAX RECEIPT AT THE OFFICE ACEH FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY UPTD PPA REGION XV SOUTH ACEH**

**Nayla Ramadhia Nazlida**

Accounting Study Program

E-Mail: [naylanazlida@gmail.com](mailto:naylanazlida@gmail.com)

*This study aims to determine The Effect of Taxpayer Awareness and Service Quality on Motor Vehicle Tax Receipt at The Office Aceh Financial Management Agency UPTD PPA Region XV South Aceh. This research is a type of associative research that uses quantitative approach. The sampling technique uses the slovin formula. The sample obtained amounted to 100 vehicle taxpayers who paid motor vehicle tax at the office of the Aceh Financial Management Agency UPTD PPA Region XV South Aceh. Data collection is carried out by directly distributing questionnaires to motor vehicle taxpayers who pay motor vehicle tax at the office of the Aceh Financial Management Agency UPTD PPA Region XV South Aceh. The data were analyzed by data quality test, descriptive statistical test, classical assumption test, multiple linear regression test, and hypothesis test. Data processing in this study used the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) software program version 29.0.*

*The results of this study show that partially taxpayer awareness has a significant influence on motor vehicle tax receipt, this is because the value of  $t$  calculated  $> t$  table ( $2,058 > 1,984$ ) and the significant value smaller than 0.05 ( $0.042 < 0.05$ ). The quality of service does not have a significant effect on motor vehicle tax receipt, this is because the value of  $t$  calculated  $< t$  table ( $-1,316 < 1,984$ ) and the significant value greater than 0.05 ( $0.191 > 0.05$ ). Then simultaneously, taxpayer awareness and service quality have a significant influence on motor vehicle tax receipt, this is because the value of  $f$  calculated  $> f$  table ( $3.472 > 3.09$ ) and the significant value smaller than 0.05 ( $0.035 < 0.05$ ). Determination coefficient value (Adjusted R Square) is 0.306 which shows that the influence of taxpayer awareness and service quality on motor vehicle tax receipt amounted to 30.6% and the remaining 69.4% was influenced by other variables outside the variables studied by the researcher.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Service Quality, Motor Vehicle Tax Receipt*

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan”** sebagai salah satu persyaratan akademik untuk dapat menyelesaikan Program Pendidikan Strata 1 (S-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak). Shalawat beserta salam senantiasa penulis hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita keluar dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang sebagaimana yang dapat kita rasakan pada saat ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang istimewa kepada ayah (**Alm**) **Drs. Ilan Nazli** dan ibu **Elidawati, S. Ag** yang senantiasa memberikan dukungan penuh kepada penulis berupa do'a tulusnya sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran – saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kepada semua pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak **Khairul Anwar Pulungan, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah rela mengorbankan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

8. Bapak **Lufriansyah, S.E., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam mengatasi segala permasalahan dalam perkuliahan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan berlangsung.
10. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai/Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus segala administrasi kampus.
11. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai/Staff Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
12. Seluruh responden yang telah bersedia membantu serta meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner penulis.
13. Saudara kandung penulis, Fitria Rahmah Nazlida S. Farm, Deltria Alisha Nazlida, Muhammad Khaliel Gibran Nazli, dan Imam Adli Alkhawaris Nazli yang telah menjadi penyemangat bagi penulis.
14. Teman – Teman seperjuangan pada konsentrasi perpajakan, Atikah Putri Nadila, Annisa Alivia, dan Helena Putri Windari yang selalu memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada penulis.
15. Teman – Teman stambuk 2019 dari kelas G Akuntansi Pagi, Siti Raudhatul Zahra, Anggi Reski Putri, dan Rahma Yanti Hasibuan yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan.

16. Teman – Teman HMJ Akuntansi UMSU, Tim Pejuang Muda Penempatan Kab. Aceh Selatan, Teman – Teman Studi Independent pada mitra PT. Orbit Future Academy, dan Tim Relawan Pajak UMSU 2023 pada KPP Medan Belawan yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.

17. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan penuh kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

***Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 2023

Penulis,



**Nayla Ramadhia Nazlida**

**NPM: 1905170324**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Rumusan Masalah .....	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	12
1.5. Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1. Landasan Teori .....	14
2.1.1. Pajak.....	14
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	14
2.1.1.2. Unsur – Unsur Pajak .....	15
2.1.1.3. Ciri - Ciri Pajak .....	18
2.1.1.4. Fungsi Pajak .....	18
2.1.1.5. Jenis Pajak.....	19
2.1.1.6. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak .....	23
2.1.1.7. Syarat Pemungutan Pajak.....	24
2.1.1.8. Sistem Pemungutan Pajak.....	25
2.1.1.9. Hambatan – Hambatan Dalam Pemungutan Pajak .....	26
2.1.1.10. Dasar Hukum Pemungutan Pajak .....	27
2.1.2. Pajak Daerah .....	28
2.1.2.1. Pengertian Pajak Daerah .....	28
2.1.2.2. Jenis – Jenis Pajak Daerah .....	28
2.1.2.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.....	30

2.1.3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	30
2.1.3.1. Pengertian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	30
2.1.3.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	35
2.1.3.3. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	35
2.1.3.4. Denda Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
2.1.4. Kesadaran Wajib Pajak .....	39
2.1.4.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak .....	39
2.1.4.2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak .....	40
2.1.4.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak.....	41
2.1.4.4. Bentuk Kesadaran Wajib Pajak.....	41
2.1.5. Kualitas Pelayanan .....	42
2.1.5.1. Pengertian Kualitas Pelayanan .....	42
2.1.5.2. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan .....	42
2.1.5.3. Indikator Kualitas Pelayanan .....	43
2.1.5.4. Bentuk Kualitas Pelayanan .....	43
2.2. Kerangka Berpikir Konseptual .....	44
2.3. Hipotesis .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	50
3.2. Definisi Operasional .....	50
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	52
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	52
3.5. Teknik Pengambilan Sampel .....	53
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.7. Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
4.1. Deskripsi Data .....	63
4.1.1. Gambaran Umum Responden .....	63
4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	66
4.2. Hasil Analisis Data .....	67
4.2.1. Hasil Uji Kualitas Data .....	67
4.2.1.1. Hasil Uji Validitas.....	67
4.2.1.2. Hasil Uji Reliabilitas .....	69

4.2.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	70
4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	72
4.2.3.1. Hasil Uji Normalitas .....	72
4.2.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas.....	75
4.2.3.3. Hasil Uji Heteroskedastitas .....	76
4.2.4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	78
4.2.5. Hasil Uji Hipotesis .....	79
4.2.5.1. Hasil Uji T.....	79
4.2.5.2. Hasil Uji F .....	81
4.2.5.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R Square</i> ).....	83
4.3. Pembahasan .....	84
4.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	84
4.3.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	85
4.3.3. Pengaruh Kesadaran Wajib dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Selatan .....	3
Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2018 s/d 2022 .....	5
Tabel 1.3. Bentuk Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	6
Tabel 1.4. Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2018 s/d 2022 .....	6
Tabel 3.1. Definisi Operasional .....	51
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	52
Tabel 3.3. Pembobotan Nilai Jawaban .....	56
Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	64
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	64
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	65
Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	66
Tabel 4.5. Pembobotan Nilai Jawaban .....	66
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) .....	68
Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan ( $X_2$ ) .....	68
Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y).....	69
Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas .....	70
Tabel 4.10. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4.11. Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	74
Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinearitas.....	75
Tabel 4.13. Hasil Uji Glejser.....	77
Tabel 4.14. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	78
Tabel 4.15. Hasil Uji t .....	80
Tabel 4.16. Hasil Uji f.....	82
Tabel 4.17. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R Square</i> ) .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Konseptual.....	48
Gambar 4.1. Hasil Analisis Grafik Histogram.....	72
Gambar 4.2. Hasil Analisis <i>Probability Plot</i> .....	73
Gambar 4.3. Hasil Analisis <i>Scatterplots</i> .....	76

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian .....	96
Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Responden .....	104
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas .....	113
Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas .....	118
Lampiran 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	119
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	119
Lampiran 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	122
Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis .....	123

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kemakmuran suatu negara ditandai dengan perekonomian yang stabil. Agar mampu mencapai kestabilan tersebut, maka suatu negara harus mampu dalam meningkatkan perekonomiannya. Cara meningkatkan perekonomian negara dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan sumber - sumber pendapatan negara, salah satunya dari hasil penerimaan pajak (Sulistiyowatie & Amelia, 2020).

Hasil penerimaan pajak akan digunakan untuk pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus ikut serta dan berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Keikutsertaan dan peran aktif dari warga negara Indonesia dapat diwujudkan dengan cara taat dalam membayar pajak (Heliarta, 2019)

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak atau masyarakat kepada negara baik itu orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (E.A. Abd'rachim, 2021).

Berdasarkan pihak yang memungutnya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam

pembangunan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Kusnanto, 2019).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah, seperti melakukan pemberian otonomi daerah bagi beberapa daerah otonom yang ada di Indonesia. Pemberian kewenangan ini agar daerah tersebut dapat mengatur sendiri pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan pajak daerah (Wulandari, 2018). Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah otonom yang mempunyai otonomi daerahnya sendiri. Provinsi Aceh merupakan provinsi yang berada di ujung barat Indonesia yang terdiri dari 23 kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak yang dikelola oleh suatu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini tergantung dari potensi daerah tersebut. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Aceh sendiri telah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, yaitu berupa pajak daerah, retribusi daerah, zakat,

hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah lainnya, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Wulandari, 2018).

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Aceh adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Kusnanto, 2019). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi kabupaten Aceh Selatan yang harus dimaksimalkan penerimaannya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Aceh Selatan.

Peningkatan pendapatan asli daerah juga dapat terbantu dengan adanya peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin meningkat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kendaraan bermotor milik pribadi (Harish & AH, 2019). Penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor (Tiawan et al., 2020).

**Tabel 1.1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Selatan**

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh Selatan	235.115	238.081	232.414	234.630	237.376

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh (2023)*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh tahun 2023, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di kabupaten Aceh Selatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga terbantu dengan adanya peningkatan jumlah penduduk tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan dalam memperlancar mobilitas masyarakat Aceh Selatan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Aceh Selatan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena hanya terdapat sebuah mobil Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) sebagai kendaraan umum yang bisa digunakan oleh masyarakat Aceh Selatan. Mobil DAMRI berperan untuk memberikan layanan angkutan perintis untuk menghubungkan daerah satu dengan lainnya berada di kawasan 3 TP (Terdepan, Terluar, Terpencil, dan Perbatasan) guna menjalankan fungsinya sebagai "*agent of development*" dalam meningkatkan pengembangan wilayah. Mobil DAMRI di kabupaten Aceh Selatan hanya melewati rute Simpang 4 Kota Fajar – Manggamat dengan tarif sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan jadwal keberangkatan pukul 06.00 s/d 12.45 WIB.

Sehingga masyarakat Aceh Selatan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sebagai alat transportasinya, terutama kendaraan roda dua dan roda empat. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor milik pribadi di Aceh Selatan juga ditandai dengan adanya pelebaran jalan satu arah untuk jalan lintas, dan pembuatan jalan dua arah untuk jalan raya yang berada di wilayah pusat pemerintahan dan pusat perkotaan.

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan merupakan instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat yang ingin melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan nyatanya belum mampu mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2018 s/d 2022**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		
	Target	Realisasi	%
2018	13.245.372.603	10.918.878.926	82.43 %
2019	13.614.210.330	12.208.675.450	89.67 %
2020	11.876.834.763	13.475.073.300	113.45 %
2021	13.322.052.300	14.257.118.100	107.01 %
2022	14.654.447.550	16.034.622.788	109.41 %

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan (2023)*

Berdasarkan data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan dari tahun 2018 s/d 2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 target dan realisasi pajak kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 113.45 %, sedangkan tahun 2018 paling rendah sebesar 82.43 %.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA wilayah XV Aceh Selatan dikatakan efektif apabila mampu menjalankan tugasnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor mencapai pada rentang 90% - 100%. Tahun 2018 dan 2019 target dan realisasi pajak kendaraan bermotor masih berada dibawah kategori efektif sebesar 82.43 % dan 89.67 %.

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan perlu memperhatikan kembali bentuk kualitas pelayanan sebagai upaya dalam

peningkatan kesadaran masyarakat Aceh Selatan tentang pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bentuk kualitas pelayanan ini akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak Aceh Selatan dalam membayar pajak.

**Tabel 1.3. Bentuk Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor**

No.	Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1.	Pemasangan spanduk disekitar halaman instansi dan jalan lintas yang sering dilewati oleh masyarakat
2.	Mengadakan sosialisasi dalam forum yang dihadiri oleh masyarakat untuk memberikan informasi tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor
3.	Melaksanakan sosialisasi "Saweu Sikula" kepada para pelajar tingkat SMA
4.	Ajakan untuk membayar pajak melalui media sosial Instagram
5.	Melakukan upaya pemutihan pajak yang berfungsi untuk meringankan pembayaran pajak terutama yang sudah terkena denda lebih dari setahun

*Sumber: Hasil wawancara dengan petugas pajak Bidang Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan (2023)*

Strategi yang diupayakan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan tidak diikuti dengan penurunan denda pajak kendaraan bermotor yang stabil. Hal ini dibuktikan dengan data denda pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 s/d 2022.

**Tabel 1.4. Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2018 s/d 2022**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Kendaraan yang membayar pajak	Kendaraan yang tidak membayar pajak	Denda PKB (dalam Rupiah)
2018	28.121	22.204	5.917	Rp9.339.102.550
2019	27.949	22.409	5.540	Rp10.309.433.600
2020	25.148	22.698	2.450	Rp11.670.851.400
2021	25.337	20.611	4.726	Rp11.480.024.200
2022	25.141	20.882	4.259	Rp12.615.373.800

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan (2023)*

Berdasarkan data denda pajak kendaraan bermotor di atas, diketahui bahwa masih banyak denda pajak kendaraan bermotor yang terjadi di Aceh Selatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Aceh Selatan dalam membayar pajak. Tahun 2018 dan 2019 jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak sebanyak 5.917 dan 5.540, sehingga penerimaan pajak tahun 2018 dan 2019 berada di bawah kategori efektif. Tahun 2020 jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak sebanyak 2.450, sehingga penerimaan pajak tahun 2020 mencapai titik tertinggi dalam jangka waktu 2018 s/d 2022. Tahun 2021 dan 2022 jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak juga tinggi sebesar 4.726 dan 4.259, akan tetapi penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 juga meningkat.

Penerimaan pajak tahun 2021 dan 2022 tidak sejalan dengan teori dimana denda yang tinggi berdampak pada penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Denda pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap perilaku taat pajak dan berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah (PAD). Jika masih banyaknya kendaraan bermotor yang belum atau bahkan tidak membayar pajak menyebabkan potensi penerimaan asli daerah berkurang. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, maka potensi PAD semakin berkurang dan tunggakan pajak kendaraan bermotor semakin tinggi (Beni et al., 2020).

Menurut Nasution (dalam Widajantie et al., 2019) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami, melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak, dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut James & Nobes (dalam Widajantie et al., 2019) kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayarkan pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Apabila kesadaran masyarakat pada perpajakan masih rendah, maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat terjaring. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan tidak diiringi dengan kesadaran wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dengan membayar pajak secara tidak tepat waktu yang dapat dilihat dari jumlah tunggakan yang terjadi. (Widajantie et al., 2019)

Tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Aceh Selatan masih tergolong rendah. Sedangkan tahun 2020 menunjukkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat. Kemudian tahun 2021 dan 2022 menunjukkan kesadaran masyarakat mulai menurun kembali. Perubahan tingkat kesadaran masyarakat ini tidak sejalan dengan bentuk kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh instansi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Hamdiah (2019) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Banda Aceh. Hasil penelitian hipotesis yang dilakukan oleh Harlia (2022) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Makassar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Putra (2019) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT kota Batam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Anisa (2020) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bandar Lampung.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari (2021) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Gianyar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Wirasedana (2020) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Klungkung.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat Aceh Selatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor masih berada di bawah kategori efektif
2. Bentuk kualitas pelayanan yang baik belum mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan yang tidak sejalan dengan teori. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan denda yang diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan?
2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan?
3. Apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kabupaten Aceh Selatan.
2. Bagi Instansi, sebagai bahan evaluasi untuk dapat melakukan upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan yang terbaik agar mampu meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kabupaten Aceh Selatan.
3. Bagi Universitas, sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sejenis dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

###### **2.1.1.1. Pengertian Pajak**

Menurut E.A. Abd'rachim (2021) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Kustanto, 2019) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi (jasa timbal balik) secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Butarbutar, 2017).

Menurut ketiga definisi di atas, maka menurut penulis definisi pajak adalah iuran wajib dari warga yang telah memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku agar dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa tanpa memperoleh timbal balik secara langsung.

### **2.1.1.2. Unsur – Unsur Pajak**

Berikut unsur – unsur pajak berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: (Kusnanto, 2019).

1. Wajib Pajak, adalah orang yang wajib membayar pajak kepada negara, baik itu pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan harus melakukan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak adalah yang termasuk subjek pajak dan memiliki objek pajak.
2. Subjek Pajak, terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
  - a. Subjek Pajak Dalam Negeri
    - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi ini yaitu seorang warga negara, karyawan pemerintah/swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
    - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan bentuk usaha lainnya.

- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Orang pribadi ini yaitu seorang warga negara, karyawan pemerintah/swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
  - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha.
  - 3) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
3. Objek Pajak, merupakan hal yang dikenakan oleh pajak yang dapat berupa peristiwa, keadaan, dan perbuatan tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a) Peristiwa, seperti kekayaan seseorang pada saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, memiliki tanah atau barang tidak bergerak seperti emas, dan menempati rumah tertentu.
  - b) Perbuatan, seperti melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, dan memperoleh penghasilan.
  - c) Peristiwa, seperti kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak, anugerah yang diperoleh secara tak terduga, dan segala sesuatu yang terjadi diluar kehendak manusia.
4. Tarif Pajak, yaitu ketentuan persentase atau jumlah biaya pajak yang harus dibayar berdasarkan dasar pengenaan pajak atas objek pajak tersebut.

Ada empat macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Tarif *Vast* (Tetap), tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah walaupun jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak berubah.
- b. Tarif Proporsional (Tarif Sepadan), tarif yang berupa persentase tetap tidak berubah, tetapi jika jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak berubah maka jumlah pajak yang harus dibayar juga berubah.
- c. Tarif *Progresif* (Meningkat), tarif yang persentasenya semakin meningkat apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.
- d. Tarif *Degresif*, tarif yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak naik.

5. Tahun Pajak, adalah jangka waktu 1 tahun takwim atau 1 tahun buku dalam pembayaran pajak.

### **2.1.1.3. Ciri - Ciri Pajak**

Beberapa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut: (Wulandari, 2018)

- a) Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara
- b) Tanpa kontraprestasi (jasa timbal balik) secara langsung
- c) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d) Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan
- e) Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah/kemakmuran masyarakat
- f) Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan sebagai alat untuk Mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi
- g) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
- h) Pajak dapat dipungut baik secara langsung maupun tidak langsung

### **2.1.1.4. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak sebagai berikut: (Kusnanto, 2019).

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), digunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Contohnya pemerintah menetapkan pajak minuman keras dengan nominal yang tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh sebagian besar generasi muda.
- c. Fungsi Pendistribusi Pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga pajak dapat membuka kesempatan kerja yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.1.1.5. Jenis Pajak**

Adapun jenis – jenis yang harus dibayar oleh wajib pajak antara lain sebagai berikut: (Kusnanto, 2019).

Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Langsung (*Direct Tax*), adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
- b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*), adalah pajak yang dipungut oleh pihak tertentu tetapi kemudian dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penjualan (PPn), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, dan Cukai.

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada di bawah Departemen Keuangan.

Berikut yang merupakan pajak pusat:

1. Pajak Penghasilan (PPh), adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Subjek PPh adalah orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah pajak yang dipungut dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik itu orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya juga atas pemasukan barang dari luar ke dalam daerah pabean. Yang dimaksud dengan daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

Adapun subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- a) Produsen atau pabrikan, yaitu pengusaha penghasil barang

- b) Pengusaha pemberi jasa, baik jasa berupa borongan pembangunan yang dikenal dengan sebutan pemborong maupun jasa teknis bangunan lain
  - c) Importir, yaitu pengusaha pengimpor barang
  - d) Pengusaha yang bertindak sebagai penyalur utama dari agen produsen serta pedagang besar
  - e) Pengusaha yang memegang atau menggunakan hak paten dari produsen
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Barang-barang kena pajak yang tergolong barang mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan pajak PPn BM. Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah pabrikan atau produsen barang mewah dan importir barang mewah.

Berikut yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah:

- a) Barang tersebut bukan termasuk barang kebutuhan pokok
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e) Apabila dikonsumsi secara berlebihan maka dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat

4. Bea Materai, adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen resmi, seperti surat perjanjian, akta notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang membuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan garing atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Termasuk dalam pengertian bangunan seperti jalan lingkungan yang terletak di dalam suatu komplek bangunan seperti hotel dan pabrik, jalan tol, dan tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas.
  6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Sedangkan yang menjadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini, penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

#### **2.1.1.6. Asas Pelaksanaan Pemungutan Pajak**

Menurut E.A. Abd'rachim (2021) pelaksanaan pemungutan pajak harus dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara. Adapun asas pelaksanaan pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas Yuridis, asas yuridis memiliki arti bahwa hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu, pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan. Jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak yakni pihak fiskus (petugas pajak) dan wajib pajak.
- b. Asas Ekonomi, selain fungsi *budgeter*, pajak juga mempunyai fungsi mengatur. Jika pemungutan pajak dari masyarakat hanya ditekankan untuk fungsi *budgeter*, dengan menekankan jumlah yang optimal tanpa

memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan dan kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan memberatkan masyarakat.

Oleh karena itu, pemungutan pajak harus diusahakan sehingga tidak sampai menghambat produksi dan perdagangan, harus diusahakan agar tidak menghalang rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan, dan harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

- c. Asas Finansial, salah satu fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter*, dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Agar hasil pemungutan pajaknya optimal, maka biaya pemungutannya harus diusahakan sekecil mungkin. Pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, pihak fiskus, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin biaya yang dikeluarkan ditekan sekecil mungkin, jika memang secara nilai tidak menguntungkan sebaiknya tidak perlu dilakukan pemungutan.

#### **2.1.1.7. Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Kusnanto (2019) dikatakan agar tidak menimbulkan berbagai hambatan dalam pemungutan pajak, maka harus memenuhi lima persyaratan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil, pajak memiliki tujuan guna menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil di sini dapat diartikan adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam hal pelaksanaannya.
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang, salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan undang-undang.

Hal ini Sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat nenaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang”.

3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa supaya tidak sampai mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
4. Pemungutan pajak harus efisien, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan supaya lebih efisien. jangan sampai pajak yang diterima Justru lebih rendah daripada biaya pengurusan pajaknya sendiri.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai. Dengan demikian, akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam hal pembayaran pajak.

#### **2.1.1.8. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:  
(Butarbutar, 2017).

- a. *Official Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak.
- b. *Self Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri,

melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak terutang yang harus dibayar.

- c. *With holding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah pihak lain, selain pemerintahan dan wajib pajak.
- d. *Semi Self With Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada fiskus (petugas pajak) dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak wajib pajak yang terutang

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment system*. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besar pajak yang terutang, menghitung besar pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang sudah seharusnya dibayar, dan melaporkannya ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

#### **2.1.1.9. Hambatan – Hambatan Dalam Pemungutan Pajak**

Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara merupakan suatu perlawanan atau hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: (Trawocadji & Sitabuana, 2022).

1. Perlawanan pasif, yaitu penolakan pajak yang berkaitan erat dengan status sosial ekonomi masyarakat. Antara lain seperti:
  - a) Pertumbuhan intelektual dan moral masyarakat.
  - b) Masyarakat yang sulit memahami tentang sistem perpajakan

- c) Sistem kontrol tidak dapat diterapkan atau diimplementasikan dengan benar
2. Perlawanan aktif, merupakan penolakan pajak yang bersifat agresif berupa serangkaian upaya untuk mencegah wajib pajak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Perlawanan aktif dapat dibagi menjadi dua jenis berikut:
- a) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), merupakan rencana penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan cara mencari dan memanfaatkan celah peraturan perpajakan.
  - b) Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), merupakan rencana penggelapan pajak yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan

#### **2.1.1.10. Dasar Hukum Pemungutan Pajak**

Menurut E.A. Abd'rachim (2021) Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan keputusan presiden atau berdasarkan peraturan perundangan lain yang lebih rendah daripada undang-undang. Karena pajak harus dibuat berdasarkan undang-undang, maka ada ketentuan konstitusionalnya, yaitu:

Dasar hukum pemungutan pajak diletakkan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi

*“Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.*

## **2.1.2. Pajak Daerah**

### **2.1.2.1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Wulandari (2018) pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pajak daerah yang bisa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, hal ini tergantung dari potensi daerah tersebut. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Kusnanto, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut ketiga definisi di atas, maka menurut penulis definisi pajak daerah adalah pungutan yang bersifat memaksa dari masyarakat dari suatu daerah kepada negara yang dapat digunakan untuk kemakmuran masyarakat daerah tersebut.

### **2.1.2.2. Jenis – Jenis Pajak Daerah**

#### **1. Pajak Provinsi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak provinsi meliputi pajak - pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- 5) Pajak Rokok, pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

## **2. Pajak Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak – pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (seperti tambang tanah, pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, granit dan lainnya)
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet

### **2.1.2.3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagai berikut: (Ramdani et al., 2020)

- a) Dibayar sendiri oleh wajib pajak
- b) Ditetapkan oleh kepala daerah
- c) Dipungut oleh pemungut pajak.

### **2.1.3. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

#### **2.1.3.1. Pengertian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Rialdy, 2022). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Irsan, 2022).

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Wulandari, 2018).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari kategori:

- a) Sedan dan jeep
- b) Minibus, Microbus dan Bus
- c) Pick Up, Light Truck, dan Truck
- d) Sepeda Motor Roda Dua, Sepeda Motor Roda Tiga, dan Mobil Roda Empat

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Setiap daerah termasuk daerah setingkat provinsi yang memiliki sumber potensi pajak kendaraan bermotor akan berlomba-lomba untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Penerimaan dari pajak kendaraan bermotor termasuk sumber utama PAD setiap daerah diluar potensi alam seperti tambang dan kekayaan alam lainnya.

Pajak kendaraan bermotor besar kecilnya dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah jumlah kendaraan bermotor itu sendiri dan jumlah penduduk. Semakin meningkat jumlah penduduk maka semakin besar penerimaan PKB (Tiawan et al., 2020). Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan PKB adalah kebijakan pemerintah dalam pemutihan pajak. Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak pajak kendaraannya dan tidak membayar pajak bisa melaksanakan pembayaran disaat pemutihan. Pemutihan pajak kendaraan bermotor juga akan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan

bermotor. Program pemutihan ini membuat wajib pajak tidak dikenakan denda, akan tetapi akan meringankan masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan, bea balik nama gratis apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokoknya saja.

Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30%, sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum (Ramdani et al., 2020).

Untuk dapat menghitung besarnya pajak kendaraan bermotor diperlukan suatu dasar untuk mengenaikannya yang disebut dasar pengenaan. Dasar pengenaan ini dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot (Hutagalung, 2016). Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum yang dimaksud adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bobot adalah suatu unsur yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 sampai dengan 1,4. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1 berarti kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Berikut penentuan nilai koefisien bobot:

- a) Mobil roda empat, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1
- b) Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025
- c) Jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,05
- d) Pick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085
- e) Bus nilai koefisien sama dengan 1,1
- f) Light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3
- g) Truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4

Berdasarkan Undang – Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.
- c. Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintahan/TNI/Polri, Pemerintahan Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
- d. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.
- e. Kendaraan di atas air ditetapkan sebesar 1,5%

Berikut formula menghitung besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

$$\begin{aligned} \text{Pajak Kendaraan Bermotor} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan dibayar sekaligus di muka. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi lainnya dari kendaraan bermotor tersebut yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Hutagalung, 2016).

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapat asli daerah yang paling potensial. Hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya di Indonesia. Adanya peningkatan tersebut dikarenakan adanya pola kebutuhan dalam memperlancar mobilitas masyarakat yang tinggi untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Selain itu, adanya tingkat pertumbuhan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga mengakibatkan tingginya konsumsi terhadap kendaraan bermotor, terutama kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Kondisi tersebut menjadikan pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah yang paling potensial.

#### **2.1.3.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek dari pajak kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan atau penguasaan dari kendaraan bermotor tersebut. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor tersebut. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau penguasa atas badan tersebut (Hutagalung, 2016).

#### **2.1.3.3. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pemungutan pajak kendaraan bermotor harus memperhatikan tingkat efektivitas agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Efektivitas pajak daerah merupakan perhitungan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan (Rum & Oktaviani, 2023). Berikut formula dan kriteria pengukuran nilai efektivitas berdasarkan kriteria kinerja keuangan.

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas**

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Tahun 1996 No.690.900.327

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB pada suatu provinsi adalah sebagai berikut: (Ramdani et al., 2020).

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### **2.1.3.4. Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak akibat keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Pratama & RFS, 2022). Berikut pengenaan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- 1) Jika keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor 1 hari, maka tidak dikenakan denda.
- 2) Jika keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor 2 hari sampai 1 bulan, maka perhitungan dendanya:  $PKB \times 25\%$ .
- 3) Jika keterlambatan 2 bulan, maka perhitungan dendanya:  $PKB \times 25\% \times 2/12$  + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- 4) Jika keterlambatan 3 bulan, maka perhitungan dendanya:  $PKB \times 25\% \times 3/12$  + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- 5) Jika Keterlambatan 6 bulan, maka perhitungan dendanya:  $PKB \times 25\% \times 6/12$  + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- 6) Jika Keterlambatan 1 tahun maka perhitungan dendanya:  $PKB \times 25\% \times 12/12$  + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

- 7) Jika Keterlambatan 2 tahun, maka perhitungan dendanya:  $2 \times \text{PKB} \times 25\% \times 12/12$  + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
- 8) Jika Keterlambatan 3 tahun, maka perhitungan dendanya:  $3 \times \text{PKB} \times 25\% \times 12/12$  + denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dipungut dari para pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) berfungsi sebagai asuransi kecelakaan bagi korban. Akan tetapi jika kecelakaannya tunggal, maka tidak bisa diajukan karena tidak dianggap sebagai korban melainkan sebagai pelaku. Besar SWDKLLJ ditentukan sebagai berikut:

1. Sepeda motor di bawah 50 cc (*cubicle centimeter* atau sentimeter kubik, yang memiliki lambang  $\text{cm}^3$  merupakan volume ruang silinder di sebuah mesin yang akan dimasuki campuran udara dan bahan bakar untuk menghasilkan tenaga), untuk mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
2. Alat berat seperti traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
3. Sepeda motor dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)

4. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
5. Pick up (mobil barang) sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
6. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bus dan microbus bukan angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Bus dan microbus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
9. Truk, mobil tangki, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

#### **2.1.4. Kesadaran Wajib Pajak**

##### **2.1.4.1. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciouness*) adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar kewajiban pajaknya kepada negara secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak yang lebih baik lagi (Ika, 2021).

Susilawati & Budiarta (dalam Bahri, 2020) kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Menurut Ramdani et al. (2020) kesadaran wajib pajak merupakan sesuatu yang timbul dari pikiran diri sendiri secara naluriah sehingga wajib pajak bisa mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan (Atarwaman, 2020).

#### **2.1.4.2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Mangkoesobroto (dalam Ramdani et al., 2020), berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak:

- a. Pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pengetahuan masyarakat semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak terutama mengenai hubungan antara biaya dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintahan.
- b. Tingkat pendidikan, hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terasa rumit bagi masyarakat.
- c. Sistem yang berlaku, terutama sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana

### **2.1.4.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Manik Asri (dalam Gaol & Sarumaha, 2022) terdapat beberapa indikator kesadaran wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela dan tepat waktu
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan

### **2.1.4.4. Bentuk Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Irianto (dalam Ramdani et al., 2020), terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak dengan tidak merasa dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Karena pajak juga akan digunakan untuk pembangunan negara demi meningkatkan kesejahteraan warga negara.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak akan membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

- c. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap warga negara.

## **2.1.5. Kualitas Pelayanan**

### **2.1.5.1. Pengertian Kualitas Pelayanan**

Menurut Barus (dalam A. Kurniawan et al., 2019) kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik seperti sikap petugas, informasi yang jelas dan mudah dimengerti, penguasaan informasi, kecepatan dan ketepatan pelayanan, daya tanggap terhadap masalah yang dihadapi wajib pajakserta penampilan petugas.

Kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat pelayanan baik maupun buruknya layanan pajak, dimana kualitas pelayanan yang baik dapat terwujud jika petugas pajak terkait melakukan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan, serta wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan (Juliantari et al., 2021).

### **2.1.5.2. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan**

Menurut Moenir (dalam Pristiria et al., 2022) ada lima faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik dapat berjalan dengan baik yang diberikan kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor kesadaran pegawai
2. Faktor aturan sebagai standar kerja pelayanan

3. Faktor organisasi yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan pelayanan
4. Faktor kemampuan dan keterampilan pegawai / skill
5. Faktor sarana yang menunjang dalam kegiatan pelayanan

### **2.1.5.3. Indikator Kualitas Pelayanan**

Untuk mengukur kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui indikator - indikator kualitas pelayanan sebagai berikut: (Dr. Hardiyansyah, 2018)

1. *Tangible* (bukti langsung), yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, perlengkapan, ruang tunggu, pegawai, sarana komunikasi, komputerisasi administrasi, dan lain lain.
2. *Reability* (keandalan), yaitu kualitas pelayanan berupa kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan segera, akurat dan memuaskan.
3. *Responsiveness* (ketanggapan), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4. *Assurance* (jaminan kepastian), mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat dipercaya yang dimiliki para staf, sehingga bebas dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan.
5. *Emphaty* (Empati), yaitu kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan.

### **2.1.5.4. Bentuk Kualitas Pelayanan**

Menurut Tjiptono (dalam Nasution, 2019) bentuk kualitas pelayanan digolongkan atas tiga komponen yaitu sebagai berikut:

- a) *Technical Quality* (kualitas teknis), yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output jasa yang diterima pelanggan.

- b) *Function Quality* (kualitas fungsi), yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian suatu jasa.
- c) *Corporate Image* (citra perusahaan), yaitu profil, reputasi, citra, dan daya tarik khusus dari perusahaan.

## **2.2. Kerangka Berpikir Konseptual**

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (E.A. Abd'rachim, 2021).

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran negara dan pembangunan negara (Atarwaman, 2020). Penerimaan pajak sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Wulandari (2018) pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pajak daerah yang bisa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, hal ini tergantung dari potensi daerah tersebut. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Untuk dapat meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), diperlukan adanya kesadaran dari wajib pajak dan juga kualitas pelayanan dari para petugas pajak (Kusnanto, 2019).

## **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciouness*) adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar kewajiban pajaknya kepada negara secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Ika, 2021).

Menurut Irianto (dalam Cahyanti et al., 2019) terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sehingga mendorong wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Pertama, kesadaran pembayaran pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga Negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan Negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan dan pembangunan sebuah Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Ika, 2021).

Penelitian diperkuat oleh Abdullah & Hamdiah (2019) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Banda Aceh. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Putra (2019) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak (masyarakat) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT BATAM.

## **2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat pelayanan baik maupun buruknya layanan pajak, dimana kualitas pelayanan yang baik dapat terwujud jika petugas pajak terkait melakukan tugasnya secara professional, disiplin dan transparan, serta wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan (Juliantari et al., 2021). Selain kesadaran masyarakat, kualitas pelayanan pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jika pelayanannya kurang maksimal, maka tentu akan mempengaruhi hasil penerimaan pajak.

Penelitian diperkuat oleh Harlia (2022) juga menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Makassar. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari (2021) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Gianyar.

### **3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

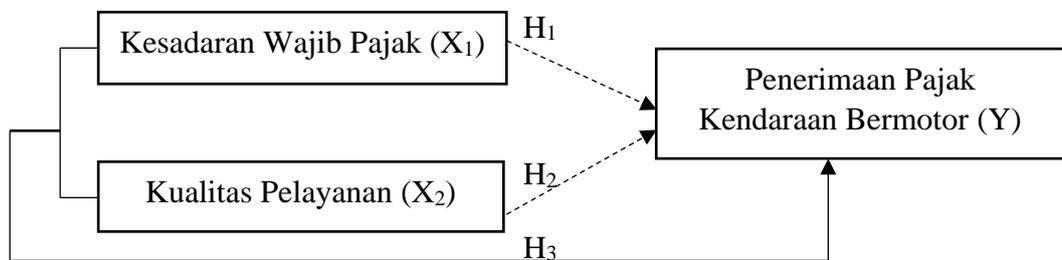
Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Rialdy, 2022). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah (Irsan, 2022).

Pajak kendaraan bermotor besar kecilnya dipengaruhi banyak faktor diantaranya adalah jumlah kendaraan bermotor itu sendiri dan jumlah penduduk. Kesadaran masyarakat dan kualitas pelayanan pajak juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jika pelayanannya kurang maksimal, maka tentu akan mempengaruhi hasil penerimaan pajak.

Penelitian diperkuat oleh Abdullah & Hamdiah (2019) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Banda Aceh. Penelitian Harlia (2022) juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Makassar.

Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantari (2021) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Gianyar. Penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Putra (2019) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak (masyarakat) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT BATAM.

Dari penjelasan diatas maka kerangka konseptualnya sebagai berikut:



**Gamabar 2.1. Kerangka Berpikir Konseptual**

Keterangan:

-----> : Pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen

————> : Pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya. Secara teknik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang diperoleh dari sampel penelitian. Sedangkan secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sampel (Ikhsan, 2018).

Berikut hipotesis dalam penelitian ini:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan.
2. Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan.
3. Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif atau hubungan. Menurut Sujarweni (dalam Rusli, 2019) penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sujarweni dalam (Rusli, 2019) pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data numerik atau angka dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik.

#### **3.2. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada variabel yang dioperasionalkan, yaitu variabel yang diteliti dan kemudian diberi arti, sehingga setiap variabel yang diteliti merupakan variabel yang spesifik (Rukajat, 2018).

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) sebagai variabel bebas pertama atau variabel independen pertama. Kualitas pelayanan ( $X_2$ ) sebagai variabel bebas kedua atau variabel independen kedua. Penerimaan pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ) sebagai variabel terikat atau variabel dependen.

Tabel 3.1. Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)  (Hadinata Mahaputra S, 2018)	Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan semua penerimaan yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.	- Target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor	Likert
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )  (Sinta Devi, 2022)	Kesadaran wajib pajak merupakan sesuatu yang timbul dari pikiran diri sendiri secara naluriah sehingga wajib pajak bisa mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.	- Wajib pajak melakukan pembayaran atas kesadaran diri sendiri - Wajib pajak tidak menunggak dalam membayar pajak - Wajib pajak mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara - Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan - Wajib pajak mengetahui pemungutan pajak sesuai undang - undang perpajakan	Likert
3.	Kualitas Pelayanan (X <sub>2</sub> )  (Kiki Rizki Novelia, 2009)	Kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat pelayanan baik maupun buruknya layanan pajak, dimana kualitas pelayanan yang baik dapat terwujud jika petugas pajak terkait melakukan tugasnya secara profesional, disiplin dan trasfaran, serta wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.	- <i>Tangible</i> , petugas pajak memberikan pelayanan dengan fasilitas kantor yang baik - <i>Reability</i> , petugas pajak melakukan pelayanan tepat waktu - <i>Responsiveness</i> , petugas pajak memiliki sikap sigap dalam memberikan pelayanan - <i>Assurance</i> , petugas pajak ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan - <i>Emphaty</i> , petugas pajak mampu berkomunikasi yang bagus dalam memberikan pelayanan	Likert

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan yang beralamat di jalan T. Ben Mahmud, Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2023 dan diharapkan akan selesai pada bulan Agustus 2023.

**Tabel 3.2. Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas Penelitian	Januari				Februari				Maret				Juni				Juli				Agustus			
		2023				2023				2023				2023				2023				2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Pra riset																								
3	Bimbingan proposal																								
4	Seminar proposal																								
5	Penyempurnaan Proposal																								
6	Pengumpulan data																								
7	Pengelolaan dan analisis data																								
8	Penyusunan skripsi																								
9	Bimbingan skripsi																								
10	Sidang meja hijau																								
11	Penyempurnaan skripsi																								

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek (*self-report data*) merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok dari sumbernya. Data subjek diperoleh berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan secara tertulis. Respon

tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan kuesioner yang diajukan oleh peneliti (Ikhsan, 2018).

## **2. Sumber Data**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan angket (kuesioner) yang meliputi angket tentang kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada wajib pajak yang terdaftar dikantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Selatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan. Data yang diambil adalah data jumlah penduduk Aceh Selatan dari tahun 2018 s/d 2022. Data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Aceh Selatan tahun 2018 s/d 2022, data denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Aceh Selatan dari tahun 2018 s/d 2022, dan wawancara terhadap upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak masyarakat Aceh Selatan.

### **3.5. Teknik Pengambilan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti (Rukajat, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan tahun 2022. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan tahun 2022 adalah sebanyak 25.141 wajib pajak.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan dari populasi (Rukajat, 2018). Besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Unit sampel

N = Jumlah populasi

E = Toleransi kesalahan diambil 10% (0.1)

Karena telah diketahui jumlah populasi tahun 2022 di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan adalah sebanyak 25.141 wajib pajak. Maka untuk menentukan besarnya sampel digunakan metode *probability sampling*, yaitu sampling dengan setiap anggota populasi memiliki peluang sama dipilih menjadi sampel. Teknik sampling yang dipakai adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Untuk menghitung sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sebagai berikut.

Perhitungan untuk memperoleh sampel dalam penelitian ini:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1+N(e)^2} \\
 &= \frac{25.141}{1+25.141(0.1)^2} \\
 &= \frac{25.141}{1+25.141(0.01)} \\
 &= \frac{25.141}{1+251,41} \\
 &= \frac{25.141}{252,41} \\
 &= 99,60 \text{ dibulatkan menjadi } 100.
 \end{aligned}$$

Jadi, ukuran sampel yang dipilih adalah sebanyak 100 orang.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner (angket). Angket merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan (Rukajat, 2018). Adapun responden dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan

Penyusunan skala pengukuran menggunakan metode *Likert Summanted Rating* (LSR) yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok pada variabel kesadaran wajib pajak, variabel kualitas pelayanan, serta penerimaan pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 3.3. Pembobotan Nilai Jawaban**

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono dalam (Ramdani et al., 2020)

### 3.7. Teknik Analisis Data

#### 3.7.1. Uji Kualitas Data

##### 3.7.1.1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan tingkat keakuratan dari hasil penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda (Ikhsan, 2018). Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk menguji data yang valid atau tidak valid setelah menggunakan alat kuesioner.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dengan membandingkan nilai dan  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ :

1. Jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka variabel tersebut valid
2. Jika nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka variabel tersebut tidak valid

Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas dengan melihat nilai Signifikansi (Sig.):

1. Jika nilai Signifikansi  $< 0.05$ , maka variabel tersebut valid
2. Jika nilai Signifikansi  $> 0.05$ , maka variabel tersebut tidak valid

### **3.7.1.1. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu instrumen dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ikhsan, 2018). Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$ , maka instrumen penelitian reliabel (konsisten). Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $< 0,70$ , maka instrumen penelitian tidak reliabel (tidak konsisten) (Al Hakim et al., 2021)

### **3.7.2. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Ikhsan, 2018). Tabulasi menyajikan ringkasan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif berupa frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian.

### 3.7.3. Uji Asumsi Klasik

#### 3.7.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Ada tiga cara untuk mendeteksi apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik, analisis *Probability Plot* (*P Plot*), dan uji statistik. Analisis grafik dapat diketahui dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk seperti lonceng atau tidak. Analisis *Probability Plot* (*P Plot*) dapat dikatakan terdistribusi normal jika data atau titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya data dikatakan tidak terdistribusi normal jika data atau titik menyebar jauh dari arah garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal.

Untuk menguji secara statistik apakah data berdistribusi normal atau tidak yang lebih efektif, dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $> 0.05$  maka nilai residual berdistribusi normal
2. Jika nilai signifikansi  $< 0.05$  maka nilai residual tidak berdistribusi normal

### 3.7.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel bebas / independen (X). Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadi interkorelasi antar variabel independen (tidak terjadi gejala multikolinearitas). Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *VIP (Variance Inflation Factor)*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas sebagai berikut:

1. Jika nilai *Tolerance*  $> 0.10$  maka tidak terjadi multikolinearitas
2. Jika nilai *VIP (Variance Inflation Factor)*  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas

### 3.7.3.3. Uji Heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variasi residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Untuk menguji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis *Scatterplots* dan uji Glejser. Melalui analisis *Scatterplots*, dasar pengambilan keputusannya jika titik-titik membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik tidak membentuk pola yang jelas,

serta titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Nasution, 2019).

Uji Glejser dilakukan dengan cara mengregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastitas sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi  $> 0.05$  maka tidak terjadi heteroskedastitas
2. Jika nilai signifikansi  $< 0.05$  maka terjadi heteroskedastitas

#### **3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas / independen (X) terhadap variabel terikat / dependen (Y) (Duli, 2019). Berikut rumus analisis regresi berganda.

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + \dots + b_n.X_n + e$$

Keterangan:

Y = Nilai yang diramalkan

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien Regresi untuk X<sub>1</sub>

b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi untuk X<sub>2</sub>

X<sub>1</sub> = Variabel bebas pertama

X<sub>2</sub> = Variabel bebas kedua

X<sub>n</sub> = Variabel bebas ke - n

e = *Term of error*

### 3.7.5. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan tentang hipotesis yang telah dibuat, seperti perbedaan atau hubungan, cukup meyakinkan untuk diterima atau ditolak (Ikhsan, 2018). Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang telah dirumuskan harus diuji kembali untuk mengetahui hasil hipotesisnya.

#### 3.7.5.1. Uji T

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas / independen (X) secara parsial ( $X_1$  atau  $X_2$ ) terhadap variabel terikat / dependen (Y). Dalam penelitian ini digunakan uji dengan taraf signifikansi 0.05 dan tingkat kepercayaan 95%.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji T sebagai berikut:

1. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan signifikansi  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka, kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan signifikansi  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka, kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

### 3.7.5.2. Uji F

Uji statistik f dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas / independen (X) secara simultan ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel terikat / dependen (Y). Uji Statistik yang digunakan pada pengujian simultan adalah uji f atau biasa disebut *Analysis of Variance* (ANOVA). Dalam penelitian ini digunakan uji dengan taraf signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan 95%.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F sebagai berikut:

1. Jika nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Jika nilai  $f_{hitung} < f_{tabel}$  dan signifikansi  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Maka, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

### 3.7.5.3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (Nasution, 2019).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Deskripsi Data**

##### **4.1.1. Gambaran Umum Responden**

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi dari responden penelitian. Penelitian dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan yang memiliki 25.141 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan pada tahun 2022.

Untuk menentukan besarnya sampel digunakan metode *probability sampling*, yaitu sampling dengan setiap anggota populasi memiliki peluang sama dipilih menjadi sampel. Teknik sampling yang dipakai adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan menjadi sampel penelitian ini yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin.

Pengambilan data responden ini lakukan langsung pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan pada hari kerja senin s/d jum'at pada jam kerja (jam 08.00 s/d 15.00) yang dimulai pada tanggal 26 Juni s/d 7 Juli 2023. Data penelitian ini diperoleh secara langsung

dari individu atau objek pajak yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan.

Kuesioner yang terkumpul sebanyak 100 lembar yang telah berisi dengan benar dan lengkap sesuai dengan kebutuhan data pada penelitian ini. Terdapat beberapa kriteria atas penyebaran kuesioner tersebut yang dapat diperoleh dari karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Berdasarkan karakteristik data responden tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase (%)
Laki – Laki	38	38%
Perempuan	62	62%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.1. dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan ketegori jenis kelamin, mayoritas responden paling banyak adalah perempuan yang berjumlah 62 orang atau 62% dan responden laki - laki yang berjumlah 38 orang atau 38% dari total keseluruhan responden.

**Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase (%)
< 25 Tahun	22	22%
25 - 30 Tahun	17	17%
30 - 40 Tahun	15	15%
> 40 Tahun	46	46%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.2. dapat diketahui karakteristik responden berdasarkan kategori usia, mayoritas responden paling banyak berada pada rentang > 40 tahun yang berjumlah 46 orang atau 46%, pada rentang < 25 tahun yang berjumlah 22 orang atau 22%, pada rentang 25 - 30 tahun yang berjumlah 15 orang atau 15%, dan pada rentang 30 - 40 tahun yang berjumlah 15 orang atau 15% dari total keseluruhan responden.

**Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase (%)
SD	1	1%
SMP	4	4%
SMA	18	18%
S1	73	73%
S2	3	3%
S3	1	1%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3. karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden paling banyak dengan tingkat pendidikan S1 yang berjumlah 73 orang atau 73%, responden dengan tingkat pendidikan SMA yang berjumlah 18 orang atau 18 %, responden dengan tingkat pendidikan SMP yang berjumlah 4 orang atau 4%, responden dengan tingkat pendidikan S2 yang berjumlah 3 orang atau 3%, dan responden dengan tingkat pendidikan paling sedikit yaitu responden dengan tingkat pendidikan SD dan S3 yang berjumlah 1 orang atau 1% dari total keseluruhan responden.

**Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase (%)
Pegawai Negeri Sipil	47	47%
Pegawai Swasta	14	14%
Wiraswasta	39	39%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4. karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, mayoritas responden paling banyak bekerja sebagai PNS yang berjumlah 47 orang atau 47%, responden bekerja sebagai Wiraswasta yang berjumlah 39 orang atau 39%, dan responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta yang berjumlah 14 orang atau 14% dari total keseluruhan responden.

#### 4.1.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 15 pernyataan pada variabel  $X_1$  dan  $X_2$ , dan 6 pernyataan pada variabel Y. Dimana yang menjadi variabel  $X_1$  adalah Kesadaran Wajib Pajak, yang menjadi variabel  $X_2$  adalah Kualitas Pelayanan, dan yang menjadi variabel Y adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kuesioner diberikan kepada 100 orang responden sebagai sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Skala Likert berbentuk tabel ceklis.

**Tabel 4.5. Pembobotan Nilai Jawaban**

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono dalam (Ramdani et al., 2020)

## 4.2. Hasil Analisis Data

### 4.2.1. Hasil Uji Kualitas Data

#### 4.2.1.1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas ini menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 29.0. Pernyataan dikatakan valid jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dan nilai signifikansi  $< 0.05$  (Ikhsan, 2018). Untuk mengetahui nilai  $r_{tabel}$ , menggunakan rumus derajat bebas atau *degree of freedom* (df).

$$\begin{aligned}
 \text{degree of freedom (df)} &= n - 2 \\
 &= 100 - 2 \\
 &= 98 \text{ (liat nilai 98 pada table r dengan signifikansi} \\
 &\text{5\% untuk uji 2 arah)} \\
 &= 0,1966
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan oleh peneliti dengan total pernyataan secara keseluruhan sebanyak 36 butir pertanyaan. Pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan kualitas pelayanan ( $X_2$ ) sebanyak 15 pertanyaan, dan pernyataan untuk variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ) sebanyak 6 pertanyaan. Berdasarkan hasil uji validitas seluruh pernyataan dikatakan valid. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semua pernyataan ini dapat digunakan dalam kuesioner penelitian. Berikut ini adalah hasil uji validitas pada setiap variabel penelitian:

**Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)**

Butir Pertanyaan	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Nilai Sig.	Keterangan
X1.1	0,675	0,196	0,001	Valid
X1.2	0,709	0,196	0,001	Valid
X1.3	0,769	0,196	0,001	Valid
X1.4	0,722	0,196	0,001	Valid
X1.5	0,729	0,196	0,001	Valid
X1.6	0,649	0,196	0,001	Valid
X1.7	0,691	0,196	0,001	Valid
X1.8	0,692	0,196	0,001	Valid
X1.9	0,642	0,196	0,001	Valid
X1.10	0,666	0,196	0,001	Valid
X1.11	0,766	0,196	0,001	Valid
X1.12	0,668	0,196	0,001	Valid
X1.13	0,740	0,196	0,001	Valid
X1.14	0,696	0,196	0,001	Valid
X1.15	0,676	0,196	0,001	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6., dapat diketahui dari 15 butir pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak yang diajukan peneliti kepada responden, semua pernyataan dinyatakan valid. Karena semua pernyataan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dan nilai signifikansi  $< 0.05$ .

**Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X<sub>2</sub>)**

Butir Pertanyaan	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Nilai Sig.	Keterangan
X2.1	0,683	0,196	0,001	Valid
X2.2	0,702	0,196	0,001	Valid
X2.3	0,703	0,196	0,001	Valid
X2.4	0,738	0,196	0,001	Valid
X2.5	0,695	0,196	0,001	Valid
X2.6	0,663	0,196	0,001	Valid
X2.7	0,714	0,196	0,001	Valid
X2.8	0,764	0,196	0,001	Valid
X2.9	0,696	0,196	0,001	Valid
X2.10	0,597	0,196	0,001	Valid
X2.11	0,730	0,196	0,001	Valid
X2.12	0,690	0,196	0,001	Valid
X2.13	0,769	0,196	0,001	Valid
X2.14	0,765	0,196	0,001	Valid
X2.15	0,762	0,196	0,001	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7., dapat diketahui dari 15 butir pernyataan mengenai kualitas pelayanan yang diajukan peneliti kepada responden, semua pernyataan dinyatakan valid. Karena semua pernyataan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dan nilai signifikansi  $< 0.05$ .

**Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)**

Butir Pertanyaan	Nilai r Hitung	Nilai r Tabel	Nilai Sig.	Keterangan
Y1.1	0,767	0,196	0,001	Valid
Y1.2	0,776	0,196	0,001	Valid
Y1.3	0,874	0,196	0,001	Valid
Y1.4	0,877	0,196	0,001	Valid
Y1.5	0,865	0,196	0,001	Valid
Y1.6	0,768	0,196	0,001	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8., dapat diketahui dari 6 butir pernyataan mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diajukan peneliti kepada responden, semua pernyataan dinyatakan valid. Karena semua pernyataan memiliki nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , dan nilai signifikansi  $< 0.05$ .

#### **4.2.1.2. Hasil Uji Reliabilitas**

Pengujian validitas ini menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 29.01.0. Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,70$ , maka instrumen penelitian reliabel (konsisten). Jika nilai *Cronbach's Alpha*  $< 0,70$ , maka instrumen penelitian tidak reliabel (tidak konsisten) (Al Hakim et al., 2021). Hasil pengujian uji reliabilitas dalam kuesioner penelitian ini  $> 0,70$ , sehingga instrumen dalam penelitian ini dikatakan reliabel (konsisten).

**Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Batas Nilai Cronbach's Alpha	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan	N of items
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	0,70	0,926	Reliabel	15
Kualitas Pelayanan (X <sub>2</sub> )	0,70	0,930	Reliabel	15
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,70	0,903	Reliabel	6

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

#### 4.2.2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, dan jumlah range. Variabel yang dimaksud yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.10. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	Descriptive Statistics							
	N	Range	Minim	Maxim	Mean		Std.	Varian
	Statisti	Statisti	Statisti	Statisti	Statisti	Std.	Deviation	ce
	c	c	c	c	c	Error	Statistic	c
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	100	26	48	74	61.00	.744	7.443	55.394
Kualitas Pelayanan (X <sub>2</sub> )	100	26	48	74	61.00	.744	7.443	55.394
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	100	12	18	30	24.23	.368	3.679	13.532
Valid N (listwise)	100							

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dari hasil analisis statistik deskriptif, pada variabel independen pertama yaitu variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) memiliki jawaban tertinggi 74 dan jawaban nilai terendah bernilai 48 sehingga diperoleh nilai mean sebesar 61,00, yang dimana jika dibagikan dengan 15 butir pernyataan maka diperoleh rata-rata respon dari responden adalah 4,06 atau dibulatkan menjadi 4 untuk setiap item pernyataan.

Variabel independen kedua yaitu variabel kualitas pelayanan ( $X_2$ ) memiliki jawaban tertinggi 74 dan jawaban nilai terendah bernilai 48 sehingga diperoleh nilai mean sebesar 61,00, yang dimana jika dibagikan dengan 15 butir pernyataan maka diperoleh rata-rata respon dari responden adalah 4,06 atau dibulatkan menjadi 4 untuk setiap item pernyataan.

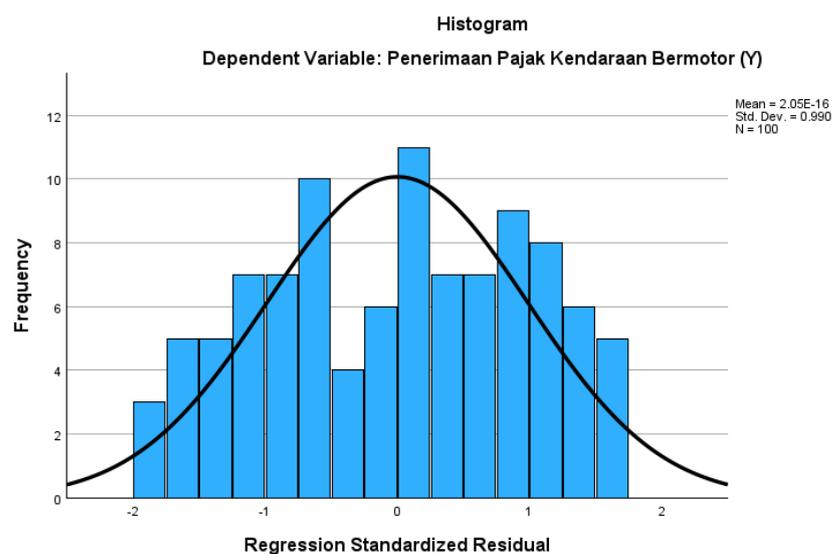
Variabel dependen yaitu variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ) memiliki jawaban tertinggi 30 dan jawaban nilai terendah bernilai 18 sehingga diperoleh nilai mean sebesar 24,23, yang dimana jika dibagikan dengan 6 butir pernyataan maka diperoleh rata-rata respon dari responden adalah 4,03 atau dibulatkan menjadi 4 untuk setiap item pernyataan.

### 4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.3.1. Hasil Uji Normalitas

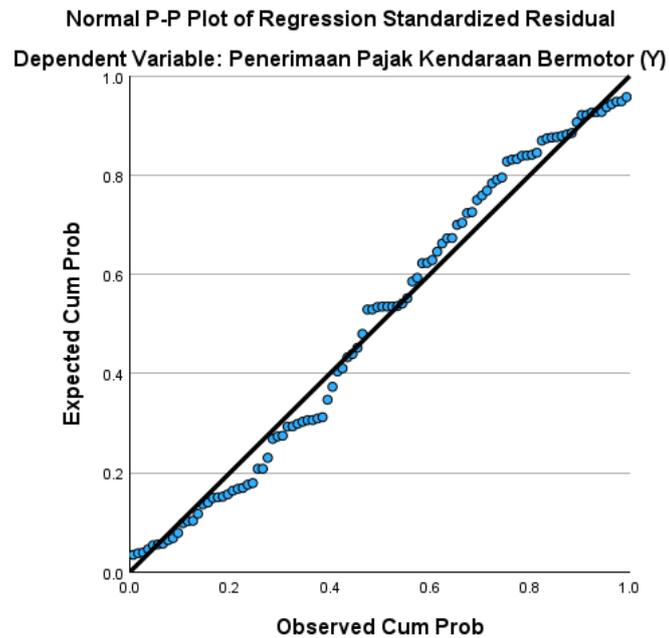
Terdapat tiga cara untuk mendeteksi apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik histogram, analisis *Probability Plot* (*P Plot*), dan uji statistik. Analisis grafik dapat diketahui dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk seperti lonceng atau tidak.

Analisis *Probability Plot* (*P Plot*) dapat dikatakan terdistribusi normal jika data atau titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya data dikatakan tidak terdistribusi normal jika data atau titik menyebar jauh dari arah garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal. Analisis statistik dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikansi  $> 0.05$  maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi  $< 0.05$  maka nilai residual tidak berdistribusi normal.



**Gambar 4.1. Hasil Analisis Grafik Histogram**

Berdasarkan gambar 4.1. di atas dari hasil analisis grafik histogram, dapat diketahui bahwa data residual terdistribusi normal dengan hasil grafik histogram yang berbentuk seperti gambar lonceng



**Gambar 4.2. Hasil Analisis *Probability Plot***

Berdasarkan gambar 4.2. di atas dari hasil analisis *P Plot*, dapat diketahui bahwa data residual terdistribusi normal karena titik - titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal.

**Tabel 4.11. Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov***

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.65749808	
Most Extreme Differences	Absolute	.080	
	Positive	.080	
	Negative	-.080	
Test Statistic		.080	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.113	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.113	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.105
		Upper Bound	.121

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.113 yang lebih > dari 0.05. Hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

#### 4.2.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *VIP (Variance Inflation Factor)*. Jika nilai *Tolerance* > 0.10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai *VIP (Variance Inflation Factor)* < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	15.402	2.091		7.365	<,001		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.068	.033	.231	2.056	.042	.783	1.277
	Kualitas Pelayanan (X2)	-.043	.033	-.148	-1.316	.191	.783	1.277

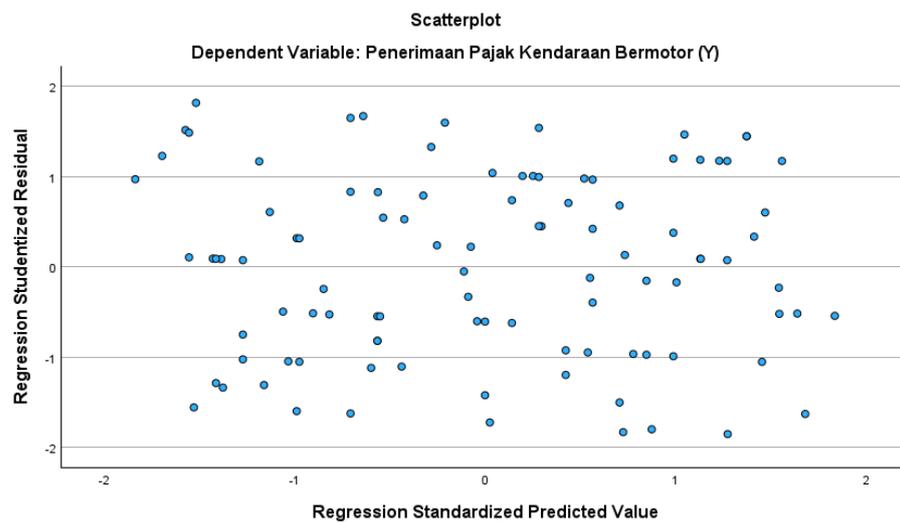
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dari hasil uji multikolinearitas, dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* > 0,10 yaitu sebesar 0,783 dan nilai *VIF* < 10 yaitu sebesar 1,277. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), kualitas pelayanan ( $X_2$ ), dan penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi.

#### 4.2.3.3. Hasil Uji Heteroskedastitas

Alat menguji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan analisis *Scatterplots* dan uji Glejser. Melalui analisis *Scatterplots*, dasar pengambilan keputusannya jika titik-titik membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Nasution, 2019).



**Gambar 4.3. Hasil Analisis *Scatterplots***

Berdasarkan gambar 4.3. di atas dari hasil analisis *Scatterplots*, dapat diketahui bahwa titik-titik di atas tidak membentuk suatu pola tertentu dan titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Glejser dilakukan dengan cara mengregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastitas sebagai berikut:

3. Jika nilai signifikansi  $> 0.05$  maka tidak terjadi heteroskedastitas
4. Jika nilai signifikansi  $< 0.05$  maka terjadi heteroskedastitas

**Tabel 4.13. Hasil Uji Glejser**

Model		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	3.657	1.811		2.020	.046		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.027	.029	.106	.935	.352	.783	1.277
	Kualitas Pelayanan (X2)	-.035	.029	-.141	-1.239	.218	.783	1.277

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 di atas dari hasil uji Glejser, dapat diketahui bahwa nilai nilai signifikansi untuk variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ )  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,352 dan nilai signifikansi kualitas pelayanan ( $X_2$ )  $> 0,05$  yaitu sebesar 0,218. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

#### 4.2.4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) yang disimbolkan dengan KWP (Kesadaran Wajib Pajak) dan Kualitas Pelayanan ( $X_2$ ) yang disimbolkan dengan (KP) terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( $Y$ ).

**Tabel 4.14. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	T	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	15.402	2.091		7.365	<.001
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.068	.033	.231	2.056	.042
	Kualitas Pelayanan (X2)	-.043	.033	-.148	-1.316	.191

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( $Y$ )

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Persamaan regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.14., *Coefficients* yang dibaca dalam kolom B, untuk kolom pertama merupakan kolom *constant* ( $\alpha$ ) dan kolom selanjutnya merupakan variabel independen yang akan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 15,402 + 0,068 \text{ KWP} - 0,043 \text{ KP} + e$$

Pada tabel 4.14 hasil regresi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 15,402, artinya jika variabel kesadaran wajib pajak (KWP) dan kualitas pelayanan (KP) bernilai 0, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ) nilainya sebesar 15,402.
2. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (KWP) sebesar 0,068 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan nilai penerimaan pajak kendaraan

bermotor sebesar 0,068. Koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Koefisien kualitas pelayanan (KP) sebesar -0,043 hal ini menunjukkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan maka nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor akan berkurang sebesar -0,043. Koefisien bernilai negatif menunjukkan variabel kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap nilai penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### **4.2.5. Hasil Uji Hipotesis**

##### **4.2.5.1. Hasil Uji T**

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas / independen (X) secara parsial ( $X_1$  atau  $X_2$ ) terhadap variabel terikat / dependen (Y). Dasar pengambilan keputusan dalam uji t sebagai berikut:

1. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan signifikansi  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Cara untuk memperoleh nilai  $t_{tabel}$  dalam penelitian ini menggunakan rumus berikut ini:

$$\begin{aligned} df &= n - k - 1 \\ &= 100 - 2 - 1 \\ &= 97 \end{aligned}$$

Keterangan:

$k$  = Jumlah variabel bebas

$n$  = Jumlah sampel atau responden

Kemudian liat nilai 97 pada tabel t dengan signifikansi 5% untuk uji 2 arah, yaitu sebesar 1,984.

**Tabel 4.15. Hasil Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	15.402	2.091		7.365	<,001
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.068	.033	.231	2.056	.042
	Kualitas Pelayanan (X2)	-.043	.033	-.148	-1.316	.191

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.15. di atas dari hasil uji t, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y)

Hipotesis: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu:

Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,058 > 1,984$ ) dan nilai signifikansi ( $0,042 < 0,05$ ). Maka  $H_1$  diterima, sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh kualitas pelayanan ( $X_2$ ) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y)

Hipotesis: kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan, karena berdasarkan hasil uji t diperoleh yaitu:

Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1,316 < 1,984$ ) dan nilai signifikansi ( $0,191 > 0,05$ ).

Maka  $H_0$  diterima, sehingga kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### 4.2.5.2. Hasil Uji F

Uji statistik f dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas / independen (X) secara simultan ( $X_1$  dan  $X_2$ ) terhadap variabel terikat / dependen (Y). Uji Statistik yang digunakan pada pengujian simultan adalah uji f atau biasa disebut *Analysis of Variance* (ANOVA).

Langkah-langkah untuk melakukan uji f dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Setelah melakukan perhitungan  $f_{hitung}$ , kemudian lihat hasil uji f yang disajikan pada tabel ANOVA. Selanjutnya cari nilai  $f_{tabel}$ , pada penelitian ini nilai  $f_{tabel}$  adalah sebesar 2,699.

Cara untuk memperoleh nilai  $f_{tabel}$  dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} df_1 (N_1) &= k - 1 & df (N_2) &= n - k \\ &= 3 - 1 & &= 100 - 3 \\ &= 2 & &= 97 \end{aligned}$$

Keterangan:

$k$  = Jumlah variabel bebas dan terikat

$n$  = Jumlah sampel atau responden

Kemudian lihat nilai 2 pada kolom df1 (N1), dan lihat nilai 97 pada kolom df (N2) pada tabel distribusi F untuk Probabilita 5%, untuk nilai (2,97) yaitu sebesar 3,09.

2. Kriteria pertama dalam uji f dapat dilihat jika nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak artinya bersama-sama berpengaruh positif antara variabel independen terhadap variabel dependen, jika nilai  $f_{hitung} < f_{tabel}$  maka  $H_3$  diterima dan secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
3. Kriteria kedua dalam dalam uji f jika nilai signifikansi  $>0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak, jika probabilitas signifikansi  $<0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima

**Tabel 4.16. Hasil Uji f**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.405	2	7.703	3.472	.035 <sup>b</sup>
	Residual	215.185	97	2.218		
	Total	230.590	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Sumber: Data primer yang dioleh, 2023

Berdasarkan dari tabel 4.16 hasil uji f, maka dapat disimpulkan bahwa  $f_{hitung}$ , dalam penelitian ini yaitu 3,472 yang artinya lebih besar dari  $f_{tabel}$  yang hanya 3,09. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini 0,035 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan secara bersama – sama dan signifikan berpengaruh terhadap variabel penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### 4.2.5.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

**Tabel 4.17. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 <sup>a</sup>	.320	.306	.581

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X<sub>2</sub>), Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dari hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*), dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,306 atau (30,6%). Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan persentase pengaruh variabel independen kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>) dan kualitas pelayanan (X<sub>2</sub>) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor (Y) mampu menjelaskan sebesar 30,6%

variabel dependen. Sedangkan sisanya 69,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### **4.3. Pembahasan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan baik secara parsial maupun simultan. Berikut ini adalah pembahasan dari masing – masing variabel independen.

#### **4.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ). Terlihat dari nilai signifikansi ( $0,042 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,496 > 1,984$ ). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima, artinya kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan.

Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*) adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar kewajiban pajaknya kepada negara secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak yang lebih baik lagi (Ika, 2021).

Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kesadaran yang tumbuh dengan sendirinya dari masing-masing wajib pajak, membuat wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajibannya tanpa harus adanya paksaan

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh James & Nobes (dalam Widajantie et al., 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayarkan pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Hamdiah (2019) dan Harlia (2022) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula pemahaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### **4.3.2. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak**

##### **Kendaraan Bermotor (PKB)**

Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan bahwa kualitas pelayanan ( $X_2$ ) secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ). Terlihat dari nilai signifikansi ( $0,191 > 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1,316 < 1,984$ ). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_2$ ) ditolak, artinya kualitas pelayanan tidak mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Barus (dalam A. Kurniawan et al., 2019) kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik seperti sikap petugas, informasi yang jelas dan mudah dimengerti, penguasaan informasi, kecepatan dan ketepatan pelayanan, daya tanggap terhadap masalah yang dihadapi wajib pajak serta penampilan petugas.

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan merupakan instansi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bentuk pelayanan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan terdiri dari empat loket yaitu loket pendaftaran, penetapan, pembayaran, dan pencetakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan, para wajib pajak puas dengan pelayanan yang diberikan. Sebelum membayar pajak, para wajib pajak sudah terlebih dahulu mempersiapkan dokumen pendukung lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) / Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotocopy, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) jika STNK / BPKB atas nama perusahaan, dan surat kuasa disertai materai dari pemilik kendaraan jika diwakilkan.

Setelah semua berkas lengkap, wajib pajak mengambil formulir untuk perpanjangan STNK tahunan dari loket pendaftaran, setelah selesai mengisi

formulir maka formulir tersebut diserahkan kembali kepada petugas loket pendaftaran sekaligus dengan berkas pendukung lainnya, jika tidak ada masalah seperti denda pajak maka petugas loket penetapan akan mengeluarkan jumlah tagihan yang harus dibayar, kemudian wajib pajak membayar jumlah tagihan yang tertera pada loket pembayaran, dan yang terakhir wajib pajak akan menerima perpanjangan STNK dari loket penetapan yang disahkan sebagai bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.

Teori yang dikemukakan oleh Juliantari yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat pelayanan baik maupun buruknya layanan pajak, dimana kualitas pelayanan yang baik dapat terwujud jika petugas pajak terkait melakukan tugasnya secara professional, disiplin dan transparan, serta wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan (Juliantari et al., 2021).

Namun, berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, ternyata kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliantari (2021) dan Darmawan & Wirasedana (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan terbaik yang telah diberikan oleh kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan. Pelayanan terbaik yang diberikan mulai dari proses pendaftaran pembayaran pajak sampai dengan proses cetak bukti pembayaran pajak, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan.

### **4.3.3. Pengaruh Kesadaran Wajib dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Hasil dari penelitian menggunakan uji f menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan mengenai variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) dan kualitas pelayanan pajak ( $X_2$ ) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor ( $Y$ ). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $3,472 > 3,09$ ) dan nilai signifikansi ( $0,035 < 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima, karena kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dalam hal ini terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor akan dicapai apabila ada hubungan yang searah antara kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*) adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana dengan cara membayar kewajibannya kepada negara secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya penerimaan pajak yang lebih baik lagi (Ika, 2021).

Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh James & Nobes (dalam Widajantie et al., 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayarkannya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

Menurut Barus (dalam A. Kurniawan et al., 2019) kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik seperti sikap petugas, informasi yang jelas dan mudah dimengerti, penguasaan informasi, kecepatan dan ketepatan pelayanan, daya tanggap terhadap masalah yang dihadapi wajib pajakserta penampilan petugas.

Teori yang dikemukakan oleh Juliantari yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan tingkat pelayanan baik maupun buruknya layanan pajak, dimana kualitas pelayanan yang baik dapat terwujud jika petugas pajak terkait melakukan tugasnya secara professional, disiplin dan trasfaran, serta wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan (Juliantari et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Hamdiah (2019) dan Harlia (2022) yang yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan.
2. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan.
3. Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan. Dimana semakin tinggi nilai kedua variabel independen tersebut, maka semakin tinggi juga penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan dan berlaku sebaliknya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah juga untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor diharapkan memperpanjang waktu pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diadakan secara rutin setiap tahun serta memperluas informasi mengenai adanya pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak apabila masyarakat tersebut telah terkena denda lebih dari satu tahun.
2. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV kabupaten Aceh Selatan agar dapat membayar pajak tepat pada waktunya sehingga hal ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan variabel independen ataupun variabel dependen lainnya sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada tiga variabel saja, serta dapat menambahkan jumlah sampel atau responden agar hasil penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z., & Hamdiah, C. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(2).
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. *MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program*, 13(1), 55–62.
- Al Hakim, R., Mustika, I., & Yuliani, W. (2021). Validitas dan reliabilitas angket motivasi berprestasi. *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)*, 4(4), 263–268.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Beni, S., Manggu, B., & Sadewo, Y. D. (2020). Pengaruh Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Perilaku Taat Pajak. *Borneo Akcaya*, 6(1), 43–57.
- Butarbutar, S. H. . S. T. . M. H. . M. M. . R. (2017). *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional* (O. D. Putri (ed.)). Gramata Publishing.
- Cahyanti, E. P., WAFIROTIN, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 40–57.
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (n.d.). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Sumber*, 34(75), 25.
- Dr. Hardiyansyah, M. S. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik* (Turi (ed.)). Gava Media.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (H. Ramadhani (ed.)). Deepublish.
- E.A. Abd'rachim. (2021). *Pajak Dalam Perekonomian Indonesia* (I. H. (ed.)). PT Perca.

- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134–140.
- Harish, M., & AH, D. S. (2019). Eksternalitas Negatif Penggunaan Transportasi Pribadi Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 19–28.
- Harlia, A., Djamali, H., & Lalo, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntansi*, 1(4), 276–290.
- Heliarta. (2019). *Pembangunan Nasional* (Susilo (ed.)). ALPRIN.
- Hutagalung, S. H. . M. H. . P. D. E. M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (W. Kurniawan (ed.)). Alqaprint Jatinangor.
- Ika, N. K. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. *JURNAL EKONOMI DAN TEKNIK INFORMATIKA*, 9(2), 42–50.
- Ikhsan, A. A. W. A. N. K. M. H. A. O. A. L. S. (2018). *Metodologi Penelitian* (H. Harmain (ed.)). MADENATERA.
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 267–272.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 183–198.
- Kustanto. (2019). *Belajar Pajak* (Yulianawati (ed.)). Mutiara Aksara.
- Nasution, A. I. D. A. R. H. S. A. L. T. N. H. H. (2019). *Statistika Ekonomi & Bisnis Untuk Perguruan Tinggi* (S. . M. B. Lubis (ed.)). Gading Jati.
- Nasution, A. P. (2019). Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (STUDI KASUS: KPP PRATAMA BINJAI). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*,

7(2), 207–224.

- Pratama, T., & RFS, H. T. (2022). Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 525–533.
- Pristiria, R. A., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2022). Faktor â€Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 533–546.
- Ramdani, R. F., Faridah, E., & Badriah, E. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1).
- Rialdy, N. R. N. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(3), 413–423.
- Rukajat, M. M. D. A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (D. Novidiantoko (ed.)). Deepublish.
- Rum, A. I., & Oktaviani, R. (2023). EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHU (PERIODE 2016-2020). *Journal of Economics, Accounting, Tax, and Management (JECATAMA)*, 2(1), 18–23.
- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh efektivitas penerapan e-filing dan modernisasi sistem perpajakan Indonesia terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Saputri, D. A., & Anisa, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Bandar Lampung. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 59–70.
- Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 75–82.
- Tiawan, H., Erfit, E., & Zulgani, Z. (2020). Pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 9(3), 119–130.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). HUKUM PAJAK DAN PEMASALAHAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 239–244.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib

Pajak kendaraan bermotor (studi kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53.

Wulandari, P. A. dan E. I. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (H. Rahmadhani (ed.)). Deepublish.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

#### KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan segala kerendahan hati, perkenalkan saya Nayla Ramadhia Nazlida mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan”**.

Berkenaan dengan hal ini, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan jawaban atas pernyataan berikut sesuai dengan pendapat pribadi Bapak/Ibu/Saudara/i dengan cara memberi tanda *checklist* (√) pada kolom yang telah tersedia. Identitas responden penelitian ini akan dirahasiakan dan isi kuesioner hanya akan dijadikan sebagai bahan acuan penelitian ini. Atas bantuan dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya



Nayla Ramadhia Nazlida

**KUESIONER PENELITIAN****A. DATA RESPONDEN**

- 1) Nama Responden :
- 2) Alamat :
- 3) Jenis Kelamin :  Laki - Laki  
 Perempuan
- 4) Usia :
- < 25 Tahun  
 25 – 30 Tahun  
 30 – 40 Tahun  
 > 40 Tahun
- 5) Pendidikan Terakhir :  SD  
 SMP  
 SMA  
 S1  
 S2  
 S3
- 6) Pekerjaan :  Pegawai Negeri Sipil  
 Pegawai Swasta  
 Wiraswasta

**B. PETUNJUK PENGISIAN**

Mohon Bapak/ Ibu/ Saudara/i memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda *checklist* (√) pada kolom yang telah tersedia. Tiap pertanyaan hanya diperkenankan satu jawaban dengan petunjuk sebagai berikut:

- |                        |       |          |
|------------------------|-------|----------|
| 1. Sangat Setuju       | (SS)  | Skor (5) |
| 2. Setuju              | (S)   | Skor (4) |
| 3. Netral              | (N)   | Skor (3) |
| 4. Tidak Setuju        | (TS)  | Skor (2) |
| 5. Sangat Tidak Setuju | (STS) | Skor (1) |

### 1. Kesadaran Wajib Pajak (X<sub>1</sub>)

No.	Uraian	SS	S	N	TS	STS
1.	Pajak merupakan kewajiban saya sebagai seorang warga negara					
2.	Saya selalu menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.					
3.	Saya dengan suka rela melakukan kewajiban perpajakan saya					
4.	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan saya tepat waktu					
5.	Saya selalu membuat catatan kecil pada kalender agar saya tidak terlambat membayar pajak					
6.	Saya mengetahui penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara					
7.	Saya memahami bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah					
8.	Saya mengetahui pajak yang dipungut akan digunakan untuk pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat					
9.	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi saya dalam menunjang pembangunan negara					
10.	Saya tidak pernah lebih bayar saat membayar pajak					
11.	Saya tidak pernah kurang bayar saat membayar pajak					
12.	Saya mengetahui jika membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlahnya akan merugikan negara					

13.	Saya mengetahui bahwa pemungutan pajak tidak dilakukan dengan semena – mena					
14.	Saya mengetahui ada dasar hukum yang jelas dalam pemungutan pajak					
15.	Saya mengetahui pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan					

## 2. Kualitas Pelayanan (X<sub>2</sub>)

No.	Uraian	SS	S	N	TS	STS
	<b>Tangible (Bukti Langsung)</b>					
1.	Lokasi kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan strategis					
2.	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan memiliki ruang tunggu yang nyaman					
3.	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan memiliki area parkir yang memadai					
	<b>Reability (Keandalan)</b>					
4.	Pelaksanaan jam kerja dilakukan dengan tepat waktu					
5.	Petugas kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan memberikan pelayanan yang cepat					
6.	Petugas kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan memberikan pelayanan dengan baik					
	<b>Responsiveness (Ketanggapan)</b>					
7.	Petugas kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan selalu bersedia menjawab pertanyaan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang ditanyakan oleh wajib pajak					
8.	Petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan mampu menjelaskan alur prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak yang belum tahu					

9.	Petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan selalu siap membantu kendala yang dialami oleh wajib pajak					
<b><i>Assurance (Jaminan Kepastian)</i></b>						
10.	Petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan menguasai peraturan Pajak Kendaraan Bermotor					
11.	Petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan menjaga kerahasiaan data wajib pajak					
12.	Petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan bersikap sopan dalam memberikan pelayanan					
<b><i>Emphaty (Empati)</i></b>						
13.	Petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan mampu melakukan komunikasi yang bisa dimengerti oleh wajib pajak					
14.	Petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan selalu memberikan kemudahan dalam pelayanan					
15.	Petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik					

### 3. Penerimaan Pajak (Y)

No.	Uraian	SS	S	N	TS	STS
1.	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan harus memiliki target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor					
2.	Masyarakat harus mengetahui penyusunan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor					
3	Masyarakat berperan penting dalam pencapaian terget penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor					
4.	Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan perlu mengajak masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam mencapai realisasi dari target yang telah dibuat					
5.	Masyarakat perlu mengetahui besaran realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor					
6.	Semakin besar realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah					

### Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Responden

No.	KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)															TOTAL (X1)
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	X1.14	X1.15	
1	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	56
2	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	65
3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	51
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	55
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	72
6	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	53
7	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	57
8	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	63
9	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	67
10	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	5	4	4	4	53
11	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	68
12	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	70
13	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	55
14	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	68
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	61
16	4	5	4	5	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	66
17	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	60
18	5	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	3	4	4	65
19	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	65
20	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	67
21	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	51
22	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	59
23	4	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	64
24	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	3	61
25	5	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	69
26	4	3	4	3	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	61
27	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	67
28	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	68
29	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	54
30	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	65
31	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	5	5	4	4	4	58
32	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	3	63
33	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	48
34	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	58
35	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	5	5	4	4	4	58
36	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	69
37	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	5	4	3	4	56
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	64

39	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	56
40	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	68
41	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	50
42	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	73
43	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	66
44	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5	5	4	60
45	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	5	5	52
46	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	70
47	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	58
48	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	49
49	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74
50	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	50
51	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	71
52	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	52
53	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	56
54	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	48
55	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	49
56	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	5	62
57	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	70
58	4	4	4	4	4	5	4	5	3	3	5	4	5	4	5	63
59	3	4	4	5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	57
60	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	50
61	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	66
62	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	53
63	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	73
64	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	72
65	4	4	4	3	4	5	3	5	3	4	5	4	5	5	3	61
66	4	4	4	4	4	4	3	3	5	3	3	3	4	3	4	55
67	5	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	52
68	4	4	5	5	5	4	5	4	3	4	4	5	4	4	3	63
69	5	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	51
70	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	52
71	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	71
72	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	67
73	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
74	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	54
75	5	4	3	3	4	4	4	3	5	4	5	5	5	5	5	64
76	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	49
77	4	5	5	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	55
78	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	54
79	4	4	3	5	3	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	60
80	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	53
81	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	66

82	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	71
83	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	48
84	4	4	3	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	57
85	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	57
86	3	4	4	4	4	3	3	4	5	3	5	4	5	4	4	59
87	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	74
89	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	70
90	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62
91	4	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	60
92	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	5	5	4	5	64
93	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	73
94	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	4	4	4	59
95	4	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	62
96	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	69
97	5	4	5	5	4	4	5	3	3	5	4	4	3	3	5	62
98	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	69
99	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	72
100	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	54



42	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	73	
43	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	66
44	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5	5	4	60
45	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	5	5	52
46	5	4	4	3	5	4	5	4	3	4	4	4	5	4	4	62
47	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	58
48	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	50
49	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	74
50	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	56
51	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	71
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	62
53	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	54
54	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	69
55	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	53
56	5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	70
57	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	70
58	4	4	4	4	4	5	4	5	3	3	5	4	5	4	5	63
59	3	4	4	5	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	57
60	4	3	4	4	5	3	4	4	5	4	5	4	4	5	5	63
61	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	4	66
62	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
63	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	3	61
64	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	63
65	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	69
66	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	53
67	5	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	52
68	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	66
69	5	3	5	4	4	4	3	3	4	4	5	4	4	5	4	61
70	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	55
71	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	69
72	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	52
73	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	59
74	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	54
75	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	72
76	3	4	3	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	60
77	4	5	5	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	55
78	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	54
79	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	56
80	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	53
81	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	66
82	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	71
83	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	68
84	4	4	3	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	3	4	57

85	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	57
86	3	4	4	4	4	3	3	4	5	3	5	4	5	4	4	59
87	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	51
88	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	55
89	5	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	70
90	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	50
91	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	52
92	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	65
93	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	50
94	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	4	4	4	59
95	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	5	67
96	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	62
97	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	49
98	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	73
99	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	72
100	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	73

No.	PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) (Y)						TOTAL (Y)
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
1	4	3	3	4	4	3	21
2	4	4	3	3	3	4	21
3	4	4	3	3	3	4	21
4	4	4	3	3	3	4	21
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	5	5	3	25
9	3	3	3	3	4	4	20
10	5	4	4	4	4	4	25
11	5	4	4	4	4	4	25
12	4	3	3	4	4	3	21
13	4	4	3	3	3	4	21
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	5	4	4	3	3	22
16	4	4	4	4	3	3	22
17	3	5	4	4	3	3	22
18	4	4	4	4	3	3	22
19	3	5	4	4	3	3	22
20	4	4	4	4	3	3	22
21	5	5	5	4	4	3	26
22	4	4	5	5	4	4	26
23	5	4	5	4	4	4	26
24	3	5	4	4	3	3	22
25	3	5	4	4	3	3	22
26	3	3	3	3	3	4	19
27	4	3	4	4	4	4	23
28	4	4	5	5	3	4	25
29	4	4	3	3	3	4	21
30	4	3	3	4	4	3	21
31	4	3	3	4	4	3	21
32	4	4	4	4	4	3	23
33	4	4	4	4	4	3	23
34	5	5	5	5	4	3	27
35	5	5	5	5	4	4	28
36	4	4	4	5	5	4	26
37	4	5	4	4	5	5	27
38	4	4	4	5	5	5	27
39	4	3	3	3	3	3	19
40	4	3	3	4	3	3	20
41	5	5	5	5	5	5	30

42	5	5	5	5	4	4	28
43	4	5	4	4	5	5	27
44	4	4	4	5	5	5	27
45	5	4	4	4	4	4	25
46	3	4	3	3	3	3	19
47	4	3	4	3	3	3	20
48	4	3	3	3	3	3	19
49	4	4	4	5	5	5	27
50	4	5	4	4	5	5	27
51	4	3	3	3	3	3	19
52	5	4	4	4	4	4	25
53	5	4	4	4	4	4	25
54	4	4	4	4	4	3	23
55	4	3	4	4	4	4	23
56	5	4	4	4	4	4	25
57	5	3	3	3	3	3	20
58	5	4	5	5	5	5	29
59	5	5	5	4	4	3	26
60	5	5	5	5	5	5	30
61	3	3	3	3	3	3	18
62	5	5	5	5	5	5	30
63	3	3	3	3	3	3	18
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	3	3	3	3	3	3	18
67	4	5	5	5	5	5	29
68	5	5	5	4	4	4	27
69	3	3	3	3	3	3	18
70	5	4	5	5	5	5	29
71	4	4	4	4	4	4	24
72	5	5	5	5	5	5	30
73	5	5	5	5	5	5	30
74	5	5	5	4	4	3	26
75	4	4	4	5	5	4	26
76	4	4	4	4	4	4	24
77	4	4	4	4	4	4	24
78	5	5	5	5	5	4	29
79	5	5	5	5	4	4	28
80	5	5	5	5	4	5	29
81	5	5	5	5	5	5	30
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	5	5	5	5	5	29
84	5	5	4	4	5	5	28

85	4	4	3	4	4	4	23
86	5	5	5	4	4	3	26
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	5	4	5	5	5	29
89	4	4	4	4	4	4	24
90	3	3	3	3	3	3	18
91	5	4	4	5	5	5	28
92	4	3	3	3	3	4	20
93	3	3	3	4	3	3	19
94	5	5	5	4	5	4	28
95	5	5	5	5	5	5	30
96	4	3	4	3	3	3	20
97	5	5	5	5	4	4	28
98	5	4	5	5	5	4	28
99	5	4	5	5	5	5	29
100	3	3	3	3	3	3	18









## 3. Uji Validitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

		Correlations						TOTAL_ Y
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
Y1.1	Pearson Correlation	1	.485**	.677**	.563**	.593**	.489**	.767**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.2	Pearson Correlation	.485**	1	.756**	.613**	.506**	.460**	.776**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.3	Pearson Correlation	.677**	.756**	1	.784**	.619**	.477**	.874**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.4	Pearson Correlation	.563**	.613**	.784**	1	.776**	.586**	.877**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.5	Pearson Correlation	.593**	.506**	.619**	.776**	1	.754**	.865**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1.6	Pearson Correlation	.489**	.460**	.477**	.586**	.754**	1	.768**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.767**	.776**	.874**	.877**	.865**	.768**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas

##### 1. Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.926	15

##### 2. Uji Reliabilitas Kualitas Pelayanan ( $X_2$ )

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.930	15

##### 3. Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	6

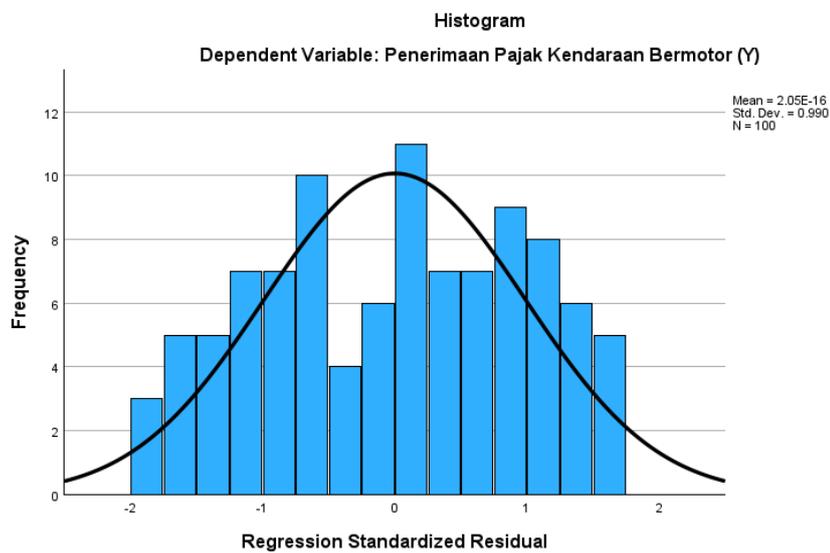
## Lampiran 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

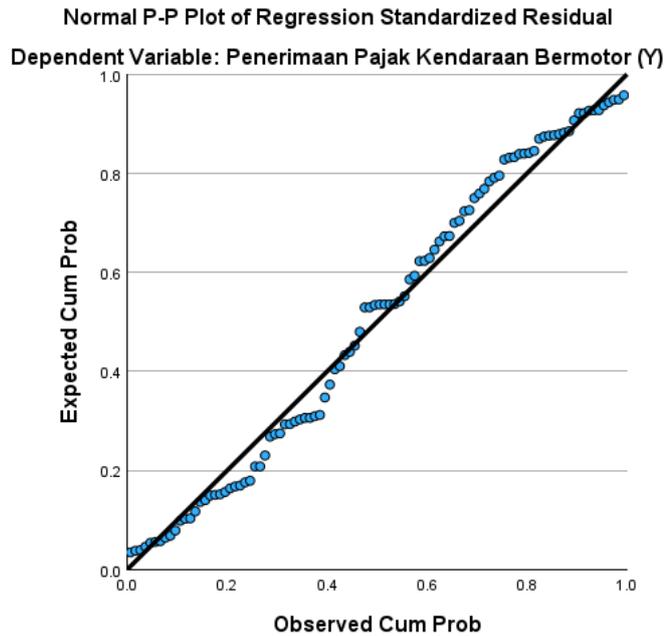
	Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
	c	c	c	c	c	c	c	c
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	100	26	48	74	61.00	.744	7.443	55.394
Kualitas Pelayanan (X2)	100	26	48	74	61.00	.744	7.443	55.394
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	100	12	18	30	24.23	.368	3.679	13.532
Valid N (listwise)	100							

## Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

#### a. Analisis Grafik Histogram



b. Analisis *Probability Plot*c. Uji *Kolmogorov-Smirnov*

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.65749808	
Most Extreme Differences	Absolute	.080	
	Positive	.080	
	Negative	-.080	
Test Statistic		.080	
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.113	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	.113	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.105
		Upper Bound	.121

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

## 2. Uji Multikolinearitas

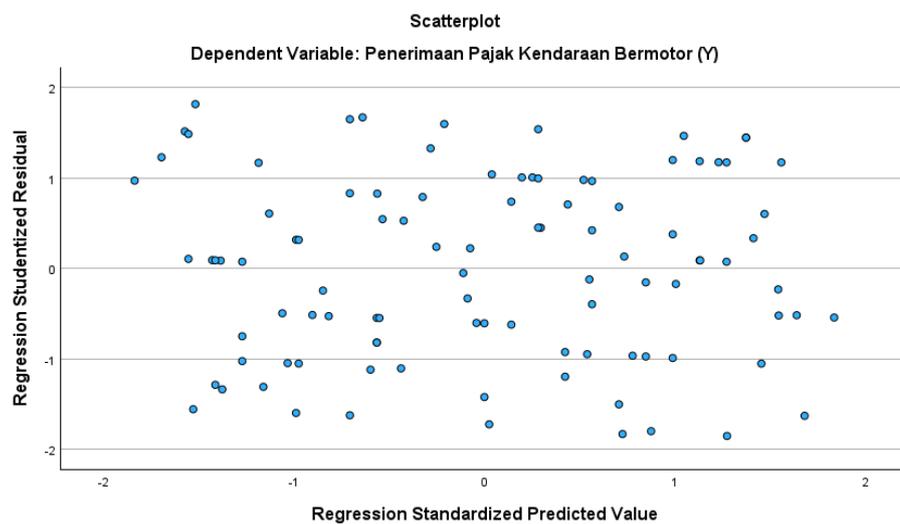
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.402	2.091		7.365	<,001		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.068	.033	.231	2.056	.042	.783	1.277
	Kualitas Pelayanan (X2)	-.043	.033	-.148	-1.316	.191	.783	1.277

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

## 3. Uji Heteroskedastitas

### a. Analisis *Scatterplots*



## b. Uji Glejser

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.657	1.811		2.020	.046		
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.027	.029	.106	.935	.352	.783	1.277
	Kualitas Pelayanan (X2)	-.035	.029	-.141	-1.239	.218	.783	1.277

a. Dependent Variable: Abs\_Res

**Lampiran 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.402	2.091		7.365	<.001
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.068	.033	.231	2.056	.042
	Kualitas Pelayanan (X2)	-.043	.033	-.148	-1.316	.191

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

## Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis

### a. Uji T

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	15.402	2.091		7.365	<.001
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.068	.033	.231	2.056	.042
	Kualitas Pelayanan (X2)	-.043	.033	-.148	-1.316	.191

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

### b. Uji F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.405	2	7.703	3.472	.035 <sup>b</sup>
	Residual	215.185	97	2.218		
	Total	230.590	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

### c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 <sup>a</sup>	.320	.306	.581

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Y)



## Output Tabel Dinamis

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2022	2021	2020	2019	2018
ACEH SELATAN	237 376	234 630	232 414	238 081	235 115

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ACEH**

UPTD: XV WILAYAH ACEH SELATAN

Tahun	Target
2018	13.245.372.603
2019	13.614.210.330
2020	11.876.834.763
2021	13.322.052.300
2022	14.654.447.550

Tapaktuan, 8 Mei 2023

Kepala UPTD XV PPA Wilayah Aceh Selatan  
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Syufriadi A, SE, M.Si  
NIP.197903232006041005



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH  
PROVINSI ACEH**

LAPORAN REKAP PENERIMAAN UPT PER JENIS KENDARAAN  
TANGGAL 1 JANUARI 2018 s/d 31 DESEMBER 2018  
UPT BAYAR : SAMSAT KESELURAHAN

**SAMSAT ASAL : KAB. ACEH SELATAN**

NO	JENIS KENDARAAN	BBN I		DENDA BBN I		BBN II		DENDA BBN II		PKB		DENDA PKB		JUMLAH		
		UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	DUPLIKAT	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH
1	SEDAN	0	0	0	0	13	10,647,800	2	67,300	87	107,126,300	17	3,097,800	1	88	120,939,200
2	JEEP	10	349,582,500	0	0	19	36,867,500	0	0	219	527,779,100	49	10,015,600	3	222	924,244,700
3	MINIBUS	191	2,797,305,200	0	0	212	239,322,700	18	1,710,900	2,569	4,532,873,626	391	55,273,900	39	2,608	7,626,486,326
4	MICROBUS	0	0	0	0	1	280,200	0	0	45	22,736,000	16	846,300	0	45	23,862,500
5	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PICKUP	36	333,057,500	0	0	25	20,415,000	4	71,600	569	779,697,350	147	26,569,500	9	578	1,159,810,950
7	LIGHT TRUCK	34	375,709,500	0	0	5	5,288,500	1	27,400	244	419,063,900	61	15,614,900	2	246	815,704,200
8	TRUCK	7	108,704,400	0	0	2	5,364,000	0	0	46	111,320,700	9	4,186,700	0	46	229,575,800
9	SEPEDA MOTOR R2	4,213	5,484,597,300	1	171,720	266	31,165,500	39	952,200	23,496	4,403,133,650	5,377	155,797,770	101	23,597	10,075,818,140
10	SEPEDA MOTOR R3	2	2,097,000	0	0	0	0	0	0	2	174,800	0	0	0	2	2,271,800
11	SEPEDA MOTOR (BECAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ALAT BERAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KENDARAAN KHUSUS	8	107,010,000	0	0	0	0	0	0	12	14,973,500	1	221,200	0	12	122,204,700
	TOTAL	4,501	9,558,063,400	1	171,720	543	349,351,200	64	2,829,400	27,289	10,918,878,926	6,068	271,623,670	155	27,444	21,100,918,316



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH  
PROVINSI ACEH**

LAPORAN REKAP PENERIMAAN UPT PER JENIS KENDARAAN  
TANGGAL 1 JANUARI 2019 s/d 31 DESEMBER 2019  
UPT BAYAR : SAMSAT KESELURAHAN

**SAMSAT ASAL : KAB. ACEH SELATAN**

NO	JENIS KENDARAAN	BBN I		DENDA BBN I		BBN II		DENDA BBN II		PKB		DENDA PKB		JUMLAH		
		UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	DUPLIKAT	UNIT	RUPIAH	
1	SEDAN	0	0	0	0	13	10,464,000	3	211,900	83	108,120,900	21	2,777,100	1	84	121,573,900
2	JEEP	17	670,360,500	1	6,747,300	22	48,618,300	4	400,300	229	695,737,900	56	17,190,800	2	231	1,439,055,100
3	MINIBUS	183	2,786,173,300	0	0	237	275,015,400	29	2,153,400	2,844	5,300,002,800	466	92,567,000	23	2,867	8,455,931,900
4	MICROBUS	1	34,069,000	0	0	10	3,400,100	4	144,300	47	30,310,800	16	1,010,500	0	47	68,934,700
5	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PICKUP	63	629,568,000	0	0	37	31,453,300	6	983,400	587	857,222,600	129	33,871,900	6	593	1,553,109,200
7	LIGHT TRUCK	15	244,703,300	0	0	22	24,280,400	1	26,800	243	469,316,200	56	22,519,800	1	244	760,846,500
8	TRUCK	0	0	0	0	5	7,937,700	0	0	29	73,433,700	4	3,001,300	1	30	84,372,700
9	SEPEDA MOTOR R2	4,442	5,858,793,700	1	227,700	322	38,124,000	28	536,600	23,819	4,653,637,400	5,021	178,392,930	77	23,896	10,729,712,330
10	SEPEDA MOTOR R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	SEPEDA MOTOR (BECAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ALAT BERAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KENDARAAN KHUSUS	2	45,225,000	0	0	0	0	0	0	16	20,893,150	8	1,889,800	0	16	68,007,950
	TOTAL	4,723	10,268,892,800	2	6,975,000	688	439,293,200	75	4,466,700	27,897	12,208,675,450	5,777	353,241,130	111	28,008	23,281,544,280



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH  
PROVINSI ACEH**

LAPORAN REKAP PENERIMAAN UPT PER JENIS KENDARAAN  
TANGGAL 1 JANUARI 2020 s/d 31 DESEMBER 2020  
UPT BAYAR : SAMSAT KESELURAHAN

SAMSAT ASAL : KAB. ACEH SELATAN

NO	JENIS KENDARAAN	BBN I		DENDA BBN I		BBN II		DENDA BBN II		PKB		DENDA PKB		JUMLAH		
		UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	DUPLIKAT	UNIT	RUPIAH	
1	SEDAN	0	0	0	0	3	2,722,000	0	0	78	121,965,800	3	1,787,800	0	78	126,475,600
2	JEEP	13	479,313,000	0	0	3	7,500,500	0	0	239	785,677,950	13	3,790,600	4	243	1,276,282,050
3	MINIBUS	168	2,727,594,000	1	1,449,000	40	48,473,800	1	14,900	3,111	6,202,409,650	167	33,200,600	58	3,169	9,013,141,950
4	MICROBUS	3	52,956,000	0	0	3	944,400	0	0	44	31,654,900	9	171,600	0	44	85,726,900
5	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PICKUP	39	423,481,500	0	0	8	5,937,000	0	0	550	828,093,100	36	4,351,700	7	557	1,261,863,300
7	LIGHT TRUCK	9	126,769,500	0	0	5	5,228,800	0	0	237	516,816,500	32	12,339,900	3	240	661,154,700
8	TRUCK	0	0	0	0	1	1,550,000	0	0	19	46,698,500	2	1,896,000	0	19	50,144,500
9	SEPEDA MOTOR R2	3,966	5,662,231,900	2	430,740	57	6,560,400	6	145,600	23,485	4,927,228,400	2,376	68,649,620	66	23,551	10,665,246,660
10	SEPEDA MOTOR R3	2	3,447,000	0	0	0	0	0	0	2	574,500	0	0	0	2	4,021,500
11	SEPEDA MOTOR (BECAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ALAT BERAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KENDARAAN KHUSUS	0	0	0	0	0	0	0	0	9	13,954,000	0	0	0	9	13,954,000
	TOTAL	4,200	9,475,792,900	3	1,879,740	120	78,916,900	7	160,500	27,774	13,475,073,300	2,638	126,187,820	138	27,912	23,158,011,160



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH  
PROVINSI ACEH**

LAPORAN REKAP PENERIMAAN UPT PER JENIS KENDARAAN  
TANGGAL 1 JANUARI 2021 s/d 31 DESEMBER 2021  
UPT BAYAR : SAMSAT KESELURAHAN

SAMSAT ASAL : KAB. ACEH SELATAN

NO	JENIS KENDARAAN	BBN I		DENDA BBN I		BBN II		DENDA BBN II		PKB		DENDA PKB		JUMLAH		
		UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	DUPLIKAT	UNIT	RUPIAH
1	SEDAN	0	0	0	0	11	13,794,900	2	187,300	75	116,259,800	13	2,067,900	0	75	132,309,900
2	JEEP	8	307,170,000	0	0	17	42,170,500	0	0	233	860,958,000	47	26,818,700	3	236	1,237,117,200
3	MINIBUS	196	3,082,968,000	0	0	289	364,749,200	33	3,109,800	3,313	6,885,167,700	516	119,084,750	17	3,330	10,455,089,450
4	MICROBUS	0	0	0	0	1	263,700	0	0	39	35,044,800	16	2,515,700	1	40	37,824,200
5	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PICKUP	99	1,163,718,000	0	0	33	32,259,000	2	133,800	587	985,303,900	110	33,505,300	4	591	2,214,920,000
7	LIGHT TRUCK	7	150,120,000	0	0	28	38,741,000	1	138,000	212	464,471,700	52	13,901,500	3	215	667,372,200
8	TRUCK	2	52,580,000	0	0	2	4,992,000	0	0	23	62,791,100	8	1,307,600	0	23	121,650,700
9	SEPEDA MOTOR R2	4,522	6,377,174,400	1	208,800	258	33,437,300	21	585,000	22,635	4,788,173,900	4,450	157,563,040	61	22,696	11,357,122,440
10	SEPEDA MOTOR R3	5	7,920,000	0	0	0	0	0	0	5	1,188,800	0	0	0	5	9,108,800
11	SEPEDA MOTOR (BECAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ALAT BERAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KENDARAAN KHUSUS	7	141,210,000	0	0	0	0	0	0	18	57,758,400	6	2,927,100	14	32	201,895,500
	TOTAL	4,846	11,282,840,400	1	208,800	639	530,407,600	59	4,133,900	27,140	14,257,118,100	5,218	359,701,590	103	27,243	26,434,410,390



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH  
PROVINSI ACEH**

LAPORAN REKAP PENERIMAAN UPT PER JENIS KENDARAAN  
TANGGAL 1 JANUARI 2022 s/d 31 DESEMBER 2022  
UPT BAYAR : SAMSAT KESELURAHAN

**SAMSAT ASAL : KAB. ACEH SELATAN**

NO	JENIS KENDARAAN	BBN I		DENDA BBN I		BBN II		DENDA BBN II		PKB		DENDA PKB		UNIT		JUMLAH	
		UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	UNIT	RUPIAH	DUPLIKAT	UNIT	RUPIAH	
1	SEDAN	0	0	0	0	9	9,526,000	2	83,200	86	154,159,900	13	2,827,800	0	86	166,596,900	
2	JEEP	21	793,440,000	0	0	17	31,750,500	0	0	248	1,035,829,900	38	18,546,200	4	252	1,879,566,600	
3	MINIBUS	272	4,324,140,000	0	0	216	275,015,900	14	1,890,700	3,726	8,035,163,538	537	161,430,568	32	3,758	12,797,640,706	
4	MICROBUS	4	149,130,000	0	0	6	4,396,800	1	24,600	46	44,250,100	13	1,191,500	2	48	198,993,000	
5	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	PICKUP	122	1,518,696,000	0	0	27	24,850,000	0	0	706	1,300,133,750	112	45,250,416	8	714	2,888,930,166	
7	LIGHT TRUCK	10	213,372,000	0	0	8	12,153,600	0	0	169	411,994,900	46	18,582,600	1	170	656,103,100	
8	TRUCK	0	0	0	0	2	4,071,000	0	0	18	86,933,000	3	3,905,900	0	18	74,909,900	
9	SEPEDA MOTOR R2	3,837	5,577,327,000	0	0	211	26,851,500	8	88,000	22,153	4,984,339,600	3,943	184,654,612	48	22,201	10,773,260,712	
10	SEPEDA MOTOR R3	2	3,114,000	0	0	0	0	0	0	4	920,300	0	0	0	4	4,034,300	
11	SEPEDA MOTOR (BECAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	ALAT BERAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	KENDARAAN KHUSUS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	897,800	0	0	25	26	897,800	
	TOTAL	4,268	12,579,219,000	0	0	496	388,615,300	25	2,086,500	27,157	16,034,622,788	4,705	436,389,596	120	27,277	29,440,933,184	



**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/11/12/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 11/12/2022

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nayla Ramadhia Nazlida  
NPM : 1905170324  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

**Identifikasi Masalah** : Dari beberapa jenis pajak yang dipungut oleh daerah, penerimaan pajak yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh Selatan kota Tapaktuan adalah jenis pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pengaruh peningkatan jumlah kendaraan bermotor di kota Tapaktuan menjadi alasan utama peneliti untuk mengajukan judul ini. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut seharusnya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Tapaktuan. Akan tetapi, realita dilapangan menunjukkan bahwa hampir sebagian besar wajib pajak kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban pajaknya tersebut. Hal ini tentu saja akan menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Tapaktuan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui faktor - faktor apa saja yang membuat masyarakat kota Tapaktuan tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan solusi terhadap permasalahan wajib pajak kota Tapaktuan yang enggan dalam membayar pajaknya. Solusi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kota Tapaktuan dalam membayar pajak kendaraan bermotornya sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Tapaktuan.

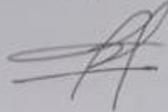
**Rencana Judul** :

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh Selatan Kota Tapaktuan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid 19
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor UPT SAMSAT Kota Tapaktuan
3. Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT SAMSAT Kota Tapaktuan

Objek/Lokasi Penelitian : UPT SAMSAT Kota Tapaktuan Provinsi Aceh Selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon



(Nayla Ramadhia Nazlida)



**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

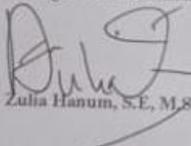
Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/11/12/2022

Nama Mahasiswa : Nayla Ramadhia Nazhida  
NPM : 1905170324  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 11/12/2022  
Nama Dosen pembimbing\* : Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si (19 Januari 2023)

Judul Disetujui\*\*

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayaran Terhadap Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor UPT. SAMBAT Koto Tapaktuan

Disahkan oleh  
Ketua Program Studi Akuntansi

  
(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 26 Januari 2023

Dosen Pembimbing

  
(Khairul Anwar Pulungan)

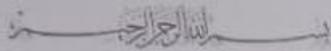
Keterangan  
\*) Diketik oleh Program Studi  
\*\*) Diketik oleh Dosen Pembimbing  
sebelum diupload oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan foto dan uploadlah lampiran ke-2 via portal sistem online "Upload pengumuman Judul Skripsi"



## PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 30 Januari 2023

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : NAYLA RAMADHIA NAZLIDA  
NPM : 1909170324  
Tempat/Tgl Lahir : LADANG TEUNGOH, 19 NOVEM  
BER 2001  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat Mahasiswa : JALAN GUNUNG SINABUNG  
NO. 26 B, MEDAN TIMUR  
Tempat Penelitian: SAMSAT TAPAK TUAN  
Alamat Penelitian : JL. T. CUT ALI, LHOK BENGK  
UANG, KEC. TAPAK TUAN

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANJUM, SE, MGR.)

Wassalam  
Pemohon

(NAYLA RAMADHIA NAZLIDA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 83/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Nomor 348/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023 Medan, 18 Rajab 1444 H  
Lampiran - 09 Februari 2023 M  
Perihal **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Kantor SAMSAT Tapak Tuan**  
Jln. T. Cut Ali, No. 26 - 27, Lhok Bengkuang, Kabupaten Aceh Selatan  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah

Nama Nayla Ramadhia Nazhida  
Npm 1905170324  
Program Studi Akuntansi  
Semester VII (Tujuh)  
Judul Skripsi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor SAMSAT Tapak Tuan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :  
1. Peringgal

Dekam  
  
Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si  
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAAN-PT/Akred/PT/III/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 349/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2023**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Nayla Ramadhia Nazlida  
N.P.M : 1905170324  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor SAMSAT Tapak Tuan

Dosen Pembimbing : **Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **09 Februari 2024**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 18 Rajab 1444 H  
09 Februari 2023 M

Dekan  
  
**Dr. H. Jaufri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



**Tembusan :**  
1. Peninggal





PEMERINTAH ACEH  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**  
**UPTD PPA WILAYAH XV ACEH SELATAN**  
Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Keutapang, Kec. Tapakuan, Kode Pos 23718

Tapaktuan, 27 Februari 2023  
07 Sya'ban 1444

Nomor : 071/15  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU  
di

Tempat

Bedasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 348/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 09 Februari 2023 Perihal Izin Riset Pendahuluan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami memberi izin kepada :

Nama Mahasiswi : Nayla Ramadhia Nazlida

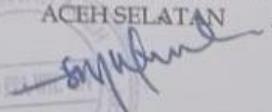
NPM : 1905170324

Program Studi : Akuntansi

Untuk melakukan riset dikantor UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

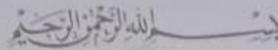
Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan Terimakasih

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH  
KEPALA UPTD PPA WILAYAH XV  
ACEH SELATAN

  
SYUFRIADI A, SE, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19790323 200604 1 005



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NAYLA RAMADHIA NAZLIDA  
N.P.M : 1905170324  
Dosen Pembimbing : KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M. SI.  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH UPTD PPA WILAYAH XV ACEH SELATAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Masukan data target & realisasi - Pertegas pengungkapan permasalahan	10/10 Maret 2023	[Signature]
Bab 2	- Teori tentang ukuran Efektivitas - teori tentang pelayanan - Penelitian terdahulu → banyak konsep	27/27 Maret 2023	[Signature]
Bab 3	- Perancis opsional - Kiri - Kiri minor	8/8 April 2023	[Signature]
Daftar Pustaka	- Sebaiknya tgl mendebat	17/17 Mei 2023	[Signature]
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- Dokumentasi - wawancara - kuisioner	22/22 Mei 2023	[Signature]
Persetujuan Seminar Proposal	- Act untuk Seminar proposal	29/29 Mei 2023	[Signature]

Medan, 31 Mei 2023

Diketahui / Disetujui  
Sekretaris Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(KHAIRUL ANWAR PULUNGAN, S.E., M.Si.)

(RIVA UBAR HARAHAP, S.E., M.Si., Ak., CA, CPA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Senin, 19 Juni 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Nayla Ramadhia Nazlida*  
NPM. : 1905170324  
Tempat / Tgl.Lahir : Ladang Teungoh, 19 November 2001  
Alamat Rumah : Jalan Gunung Sinabung No. 26 B, Glugur Darat II, Medan Timur  
Judul Proposal : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>Tambah pernyataan teori riset gap pada latar belakang perbaiki identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara pengutipan teori.</i>
Bab III	<i>-Perbaiki jenis penelitian, sumber kuisioner di cantumkan -Perbaiki sumber dan jenis data</i>
Lainnya	.....
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 19 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si

Pembanding

Sukma Usmana, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 19 Juni 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Nayla Ramadhia Nazlida  
NPM : 1905170324  
Tempat / Tgl.Lahir : Ladang Teungoh, 19 November 2001  
Alamat Rumah : Jalan Gunung Sinabung No. 26 B, Glugur Darat II, Medan Timur  
Judul Proposal : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si*

Medan, 19 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zuhra Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Khairul Anwar Pulungan, SE., M.Si

Pembanding

Sukima Lesmana, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si  
NIDN : 0105087601



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAH-PT/Akred/PT/08/2018  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 1788/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lamp. : -  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 30 Dzulhijah 1444 H  
18 Juli 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan**  
Jln. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Nayla Ramadhia Nazlida  
N P M : 1905170324  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aceh UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Peringgal

Dekan  
  
**Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH ACEH  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**  
**UPTD PPA WILAYAH XV ACEH SELATAN**  
Jl. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Keutapang, Kec. Tapakuan. Kode Pos 23718

Tapaktuan, 14 Agustus 2023  
27 Muharram 1445

Nomor : 071/41  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UMSU  
di

Tempat

Bedasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 788/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 18 Juli 2023 Perihal Menyelesaikan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami Beritahukan bahwa :

Nama Mahasiswi : Nayla Ramadhia Nazlida

NPM : 1905170324

Program Studi : Akuntansi

Telah menyelesaikan riset/survey dikantor UPTD PPA Wilayah XV Aceh Selatan  
Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Demikian kami sampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan Terimakasih

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH  
KEPALA UPTD PPA WILAYAH XV  
ACEH SELATAN

SYUFRIADI A, SE, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19790323 200604 1 005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Nayla Ramadhia Nazlida  
NPM : 1905170324  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ladang Teungoh, 19 November 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke : 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara  
Alamat : Jalan Gunung Sinabung No. 26 B, Glugur Darat II,  
Medan Timur  
No. Telephone : 0852 1340 0336  
E-Mail : [naylanazlida@gmail.com](mailto:naylanazlida@gmail.com)

### 2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : (Alm) Drs. Ilan Nazli  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Elidawati, S. Ag  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jalan T. Chik Kilat Fajar, Lr. Taqwa, Desa Kota Fajar,  
Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan  
No. Telephone : 0852 7051 7070  
E-Mail : [elidawatiramlii@gmail.com](mailto:elidawatiramlii@gmail.com)

### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2007 – 2013 : SD Negeri 2 Ladang Teungoh  
Tahun 2013 – 2016 : SMP Negeri 1 Kluet Utara  
Tahun 2016 – 2019 : SMA Negeri Unggul Kabupaten Aceh Selatan  
Tahun 2019, tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 09 Agustus 2023



Nayla Ramadhia Nazlida